jurnal kajian
LEMHANNAS RI
Edisi 23 | September 2015

Optimalisasi Kepemimpinan Negarawan
dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional

Pendidikan Karakter Bangsa
di Perguruan Tinggi guna memperkokoh Ketahanan Nasional

Implementasi Nilai-nilai Pancasila
dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional di Bidang Ideologi

Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional
dari Heartland ke Asia Pasifik. Apa Geopolitik Leverage Indonesia?

Penamaan Kodam Cermin Politik Integrasi TNI

Memperkuat Segitiga Pertahanan Indonesia

Jakarta, Septrember 2015

PEMIMPIN REDAKSI

● **PELINDUNG:** Budi Susilo Soepandji ● **PEMBINA:** Didit Herdiawana ● **PENGARAH:** Suhardi Alius ● **PEMIMPIN REDAKSI:** E. Estu Prabowo ● **EDITOR:** Wahyu Wiji - Sumurung - Trias Noverdi ● **DESAIN:** Bambang Iman Aryanto - Suryadi ● **SEKRETARIAT:** Muhammad Isdar - Linda Purnamasari - Gatot ● **DISTRIBUSI:** Supriyono - Indiah Winarni ● Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Ultima Sarana Abadi

4
Optimalisasi Peran Kepemimpinan Negarawan dapat Meningkatkan ketahanan Nasional

11
Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi guna Memperkokoh Ketahanan Nasional

23
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional di Bidang Ideologi

36
Penamaan Kodam Cermin Politik Integrasi TNI

52
Memperkuat Segitiga Pertahanan Indonesia

61
Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik. Apa Geopolitik Leverage Indonesia?

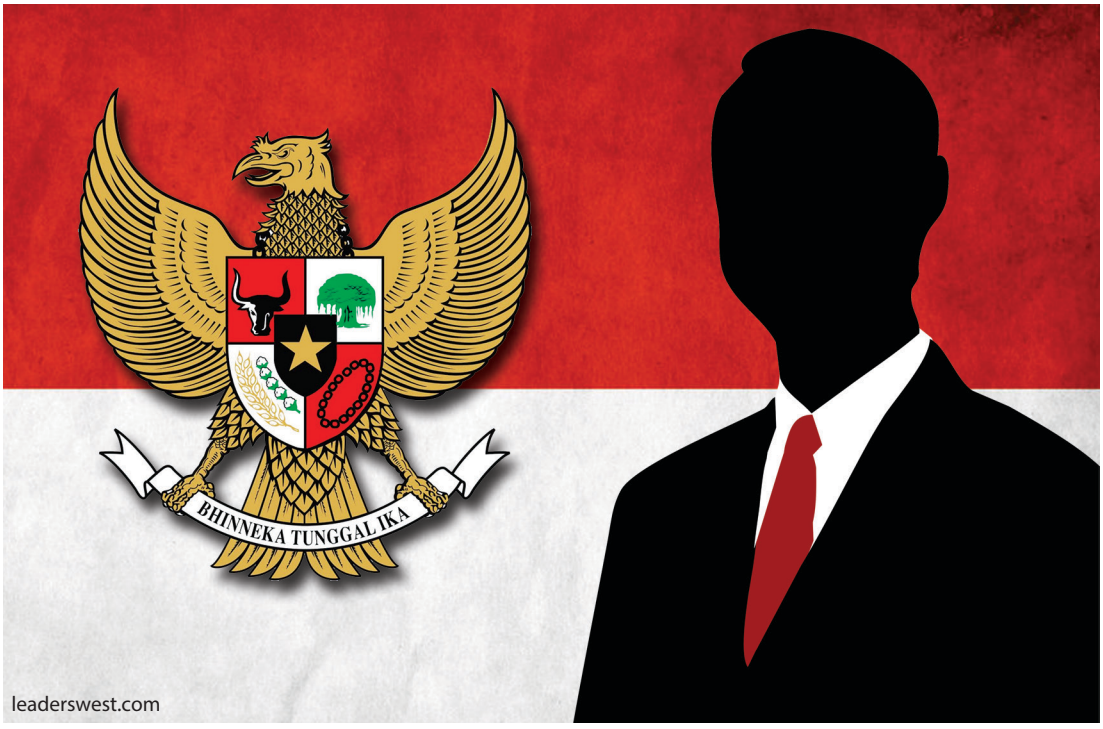

Optimalisasi Peran Kepemimpinan Negarawan dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional

Asmawie Prawiro
Peseta PPRA LIII Lemhannas RI

I. Pendahuluan

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Wawasan Nusantara. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam.

Dalam konteks ini, keseluruhan faktor tersebut harus dapat dikelola negara melalui peran yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok elit bangsa, yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk *"empowerment all resources"* menuju tercapainya cita-cita nasional sesuai dengan moral dan etika Pancasila.

Namun, saat ini Negara Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan nasional. Peran pemimpin negarawan seolah semakin sulit dirasakan karena

zaman telah berubah. Masyarakat Indonesia saat ini tengah mengalami suatu perubahan sosial budaya dalam skala yang besar serta berlangsung cepat karena perkembangan tiga faktor utama, yaitu pesatnya kemajuan Iptek, masalah kependudukan, dan persoalan lingkungan hidup. Dalam menghadapi setiap perubahan, peran dan fungsi kepemimpinan nasional dibutuhkan oleh masyarakat untuk melestarikan sistem sosial budaya serta memacu kemajuan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih bermakna.

Reformasi yang sedang berlangsung saat ini telah menghasilkan berbagai perubahan positif dalam tata kehidupan nasional, namun harus diakui bahwa reformasi telah mengkikis sistem sosial budaya masyarakat, serta mendegradasi karakter dan jatidiri bangsa. Para pemimpin dan kelompok elite yang muncul lebih banyak mengedepankan pragmatisme kekuasaan dan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis keteladanan dan krisis kenegarawanan. Selain itu, seringnya terjadi pertentangan antar elite dan benturan antar institusi Negara membuat rakyat menjadi semakin apatis dan memiliki persepsi negatif terhadap setiap penyelenggaraan proses politik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun. Muncul krisis kepercayaan atau delegitimasi terhadap para pemimpin dan kepedulian terhadap persoalan kebangsaan juga turut melemah. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi ketangguhan ketahanan nasional, karena ketiadaan kerja sama antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, akan diuraikan pemahaman tentang kepemimpinan negarawan, kondisi kepemimpinan nasional saat ini, dan peran kepemimpinan negarawan pada partai politik, sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

II. Pembahasan

1. Pemahaman Kepemimpinan Negarawan.

Diskursus tentang masalah kepemimpinan (*leadership*) dan kenegarawanan (*statesmanship*) tidak mungkin dilakukan dalam ruang yang hampa. Kedua hal tersebut lahir sebagai suatu konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia, yang terlahir sebagai individu dengan ketergantungan sosial sangat tinggi dalam mencapai tujuan bersama, memelihara tertib sosial dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Melalui proses inilah akan muncul tokoh-tokoh pemimpin dan negarawan yang tidak lahir dengan tiba-tiba.

Dalam bahasa Inggris, negarawan disebut *"statesman."* Menurut kamus Merriam-Webster, **negarawan** adalah **"orang yang aktif mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan" (*one actively engaged in conducting the business of a government or in shaping its policies*)**. Lebih spesifik lagi, Merriam-Webster mendefinisikan negarawan sebagai" seorang pemimpin politik yang bijak, cakap, dan terhormat" (a *wise, skillful, and respected political leader*). Pengertian pertama mengacu kepada pemimpin di pemerintahan, sementara pengertian kedua mengacu kepada pemimpin politik (politisi) yang memiliki sifat-sifat terpuji seperti bijaksana, cakap, dan terhormat.

Negarawan adalah orang yang tengah menjalani pemerintahan, baik presiden, menteri, maupun gubernur, atau pemimpin politik yang berada di luar pemerintahan. Perbincangan

tentang negarawan masuk dalam wilayah Filsafat Politik. Para filsuf umumnya berbicara tentang kriteria-kriteria pemimpin politik. Plato pernah menulis sebuah buku dialog berjudul ”Negarawan” (*Statesman*), di mana dia menguraikan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengelola suatu negara. Menurut Plato, negarawan harus memiliki kecakapan khusus dalam mengelola negara, sehingga dia bisa berlaku adil dan mengetahui apa yang diinginkan rakyatnya.

Tokoh yang berjasa pada bangsa dan negara akan mengabdikan pikiran dan tenaganya bagi kemajuan dan kemakmuran bangsanya. Kepemimpinan negarawan sangat berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Sikap ini menuntut politisi untuk meminimalkan kepentingan pribadi dan kelompok, serta memaksimalkan kepentingan bangsa dan negara. Kiki Syahnakri menulis bahwa kenegarawanan adalah karakter, sikap, visi, dan orientasi yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan melampaui ego sang pemimpin.

2. Kepemimpinan Nasional Saat Ini.

Salah satu kendala bagi terbentuknya karakter kenegarawanan adalah *power-oriented* yang obsesif. Hal ini dilatarbelakangi oleh tendensi untuk mengoleksi dan mengakumulasi segala sumber daya dalam merebut/ mempertahankan kekuasaan. Di tengah proses kontestasi politik yang semakin terbuka saat ini, semakin banyak pihak yang memilih untuk berlomba-lomba merebut dan mempertahankan kekuasaan. Padahal, karakter kenegarawanan bukanlah semata-mata mengejar kekuasaan, melainkan berupaya mewujudkan kepentingan rakyat melalui kekuasaan yang dimilikinya.

Karakter tersebut tidak datang dari pemimpin nasional yang memiliki kapabilitas dan kompetensi tertentu, tetapi hadir lewat sosok negarawan dalam individu pemimpin nasional. Karakteristik seorang negarawan berkaitan dengan terdapatnya karakter yang *“extraordinary”* dalam sosok pemimpin nasional. Seorang pemimpin nasional yang negarawan tidak mendasarkan kebijakan dan tindakan kepemimpinan pada kepentingan individu atau golongan, serta tidak akan bersikap diskriminatif dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Namun sosok pemimpin negarawan dewasa ini sulit ditemukan seiring dengan makin dinamisnya perkembangan lingkungan strategis. Kehadiran pemimpin negarawan di Indonesia sangat didambakan untuk menghadapi beberapa persoalan mendasar, yang berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan nasional. Beberapa contoh persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kenegarawanan di antaranya yaitu degradasi moral masyarakat, kompleksitas penanganan konflik komunal, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Implikasi lainnya dapat dilihat dari banyaknya pemimpin yang terjerat masalah korupsi yang seolah-olah sudah menjadi budaya, yang diikuti oleh sikap apatisme dalam upaya mengatasi persoalan kebangsaan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya peran pemimpin negarawan, sehingga dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi ketangguhan ketahanan nasional.

Berbagai persoalan kebangsaan yang terus terjadi sampai saat ini diyakini oleh karena faktor kepemimpinan nasional.

Sebagian kalangan menyatakan bahwa krisis kepemimpinan di Indonesia telah berdampak terhadap pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menurunnya stabilitas keamanan dalam negeri. Beberapa ahli mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis tersebut. Achmad Sanusi berpendapat bahwa terjadinya krisis kepemimpinan disebabkan oleh sikap mempertahankan hegemoni kenegaraan dan pemerintahan, sikap paternalis-feodalis para pimpinan ormas, pimpinan parpol, maupun pimpinan birokrasi pemerintahan, serta pertumbuhan sektor swasta bersifat semu karena hasil *mark-up*, fasilitas dan praktik korupsi, kolusi serta nepotisme.

Kondisi tersebut memicu terjadinya krisis kepemimpinan, sehingga dewasa ini masyarakat kesulitan dalam menemukan para pemimpin lembaga pemerintahan, ormas, parpol, bisnis dan profesi yang amanah, adil, kuat dan visioner, yang selalu hidup bersahaja dan patut menjadi teladan seluruh masyarakat.

Karakter seorang pemimpin memberi pengaruh besar pada efektivitas kepemimpinannya. Publik menilai, saat ini tidak ada sosok pemimpin berkarakter yang mampu mengatasi persoalan bangsa. Hasil jajak pendapat Kompas tahun 2012, mengungkapkan pandangan 686 responden di 12 kota besar Indonesia tentang ketiadaan sosok pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan bangsa. Dari 10 responden, enam diantaranya tidak bisa menyebutkan nama tokoh pemimpin di masa kini yang dinilainya akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa.

Secara khusus, bahkan, sepertiga bagian responden menyatakan dengan lugas, tidak ada satu pun sosok yang bisa memimpin bangsa melewati berbagai hambatan saat ini ataupun di masa depan.

Kondisi tersebut juga diiringi oleh terjadinya krisis kepemimpinan dalam tubuh partai politik, sebagai salah satu mekanisme dalam kaderisasi calon-calon pemimpin nasional. Terjadinya krisis pada tingkat pimpinan partai politik tersebut antara lain disebabkan oleh karena kurang efektifnya proses rekrutmen dan kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik. Calon legislatif dan eksekutif yang diajukan sebagai pemimpin nasional dikhawatirkan belum melalui tahapan-tahapan dan proses seleksi yang benar dan belum diadopsinya standar Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) yang meliputi penilaian moralitas dan akuntabilitas individual, sosial, institusional maupun global.

3. Peran pemimpin negarawan dalam partai politik dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Melemahnya kepemimpinan nasional, tidak terlepas dari lemahnya fungsi partai politik sebagai lembaga rekrutmen para pemimpin, baik daerah maupun nasional. Partai politik juga tidak mampu melakukan rekutmen kepemimpinan. Realitasnya, begitu banyak kader-kader partai politik baik yang berada di legislatif, birokrat maupun pada posisi elite pimpinan partai terbelit kasus korupsi.

Partai politik merupakan produk dari proses politik sekaligus sebagai sarana pembangunan politik bangsa dan masyarakat Indonesia. Dalam memenuhi rekrutmen kader-kadernya untuk disiapkan menjadi Pimpinan Tingkat Nasional, salah satu peran partai politik adalah untuk menyiapkan anak bangsa dalam menggeluti persoalan-persoalan yang

timbul dalam medan kehidupan, dalam bentuk atensi dan partisipasi serta menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab sebagai kader Pemimpin Tingkat Nasional.

Keberadaan seorang Pemimpin Tingkat Nasional yang mempunyai kategori kepemimpinan sekaligus kenegarawanan dirasakan saat ini merupakan suatu konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia Indonesia pada era reformasi ini dengan dihadapkan kepada suatu kondisi euforia demokrasi, sekaligus sebagai suatu kebutuhan bangsa Indonesia untuk mendapatkan seorang pemimpin yang dapat membawa bangsa ini kepada cita-cita nasional bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke 4.

Pilpres tahun 2014 menunjukkan peran partai politik dalam menyiapkan pemimpin nasional diuji. Hal utama yang paling mendesak adalah merekrut dan menyiapkan kader-kader yang dinilai pantas untuk menjadi Pemimpin Tingkat Nasional sekaligus negarawan pada pemilu Kepada Daerah bulan Desember 2015 yang akan datang.

Terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat nasional maupun di sektor politik secara langsung akan berdampak terhadap partisipasi politik masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kurangnya efektivitas dalam mekanisme rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan tentu akan mempengaruhi pelemahan partisipasi politik masyarakat. Bentuk dari pelemahan partisipasi politik ini dapat dilihat dari keanggotaan di tubuh partai politik maupun yang terjadi pada kalangan masyarakat di luar partai politik. Melemahnya partisipasi politik masyarakat tersebut ditunjukkan sebagai respon dan wujud ketidakpuasan terhadap kinerja pemimpin nasional.

Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memililih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Berdasarkan sejumlah faktor di atas, maka peran Pemimpin negarawan yang visioner menurut *Burt Nanus, 2001,* yaitu *sebagai* **penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih** tentu sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kondisi tersebut menjadi persoalan fundamental karena berimplikasi terhadap ketahanan politik bangsa dan ketahanan nasional secara umum.

Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya kepemimpinan tingkat nasional yang negarawan, partai politik harus mengacu kepada standar IKNI. Hal ini dapat dilakukan melalui proses verifikasi rekam jejak, serta menanamkan nilai-nilai nasional, kenegarawanan dan kebangsaan terhadap para kader yang akan dicalonkan menjadi pejabat legislatif atau calon kepala daerah. Dengan demikian, calon/figur yang diajukan oleh partai politik bersangkutan telah memiliki kemampuan, kompetensi dan karakteristik yang memadai sebagai pemimpin negarawan.

Selanjutnya, mengenai faktor budaya politik dan motivasi masyarakat,

peran pemimpin negarawan dapat dioptimalkan melalui sikap dan perilaku yang dapat diteladani. Implementasi pemimpin yang berkarakter negarawan dalam menjalankan kepemimpinan nasional dapat ditunjukkan melalui sikap yang mencerminkan moralitas dan akuntabilitas individual, sosial, institusional maupun global. Pemimpin negarawan akan teguh berdiri di atas semua kepentingan kelompok, golongan dan perbedaan. Sosok pemimpin negarawan akan dapat memper-tanggungjawabkan kepemimpinannya, baik melalui kebijakan yang ditetapkan maupun langkah-langkah yang ditempuh, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa aspirasinya telah diperjuangkan dan diupayakan sedemikian rupa guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan.

Pemimpin yang menunjukkan sikap dan komitmen sebagai seorang negarawan nantinya akan mampu memperoleh respek, kepercayaan, dan legitimasi dari masyarakat. Melalui kepercayaan dari masyarakat tersebut, akan mampu dibangun budaya politik yang lebih aktif dan partisipatif, sehingga masyarakat merasa menjadi bagian integral dari suatu sistem politik nasional. Masyarakat diharapkan akan memiliki kesadaran, pemahaman, dan kepedulian untuk berpartisipasi dalam berbagai proses politik, yang dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk berupa hak pilih dalam pemilu, diskusi publik, rapat dengar pendapat, bela Negara, dan ketaatan terhadap hukum serta pemimpin nasional. "*Pemimpin berkarakter negarawan diyakini akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik,sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap proses penyelenggaraan negara dan pembangunan,serta pada gilirannya dapat mendukung ketangguhan ketahanan nasional bangsa Indonesia.*"

III. Penutup

1. Kesimpulan.

Kepemimpinan nasional saat ini masih belum cukup optimal dalam mengimplementasikan karakter seorang pemimpin negarawan. Bangsa Indonesia tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi memadai, tetapi juga diharapkan memiliki karakteristik dan kepribadian yang bersifat negarawan. Pemimpin negarawan merupakan suatu ciri kepemimpinan nasional yang ideal, yang mencerminkan terpenuhinya berbagai unsur moralitas dan akuntabilitas individual, sosial, institusional maupun global.

Tengah terjadi krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin nasional. Pemimpin nasional yang hanya berorientasi kekuasaan dan kepentingan pribadi/ kelompok yang mengakibatkan terjadinya delegitimasi terhadap kinerja kepemimpinan nasional. Akibatnya masyarakat pun semakin acuh tak acuh dan menunjukkan sikap kurang peduli dalam proses pembangunan nasional. Kondisi ini sesungguhnya merefleksikan bahwa masyarakat masih belum merasakan keteladanan dari figur pemimpin nasional yang berkarakter negarawan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sosok pemimpin tingkat nasional yang berkarakter negarawan, sehingga sikap dan perilaku mereka dapat diteladani. Perbaikan kinerja para pemimpin dalam pelaksanaan tugas kenegaraan diharapkan akan dapat meningkatkan citra positif di mata masyarakat sehingga akan terbangun kepercayaan yang lebih

baik terhadap kredibilitas pemimpin nasional. *"Sinergi antara pemimpin yang berciri negarawan bersamaan dengan legitimasi yang diperoleh dari masyarakat akan dapat mendorong kepercayaan masyaraat pada partai politik yang pada akhirnya dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh"*.

2. Saran.

Pertama, pemerintah bersama partai politik perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses rekrutmen, kaderisasi, dan seleksi kepemimpinan nasional serta menjadikan IKNI sebagai acuan melalui penataan regulasi.

Kedua, para pemimpin tingkat nasional, baik dalam lingkup supra-struktur, infrastruktur maupun substruktur membangun komitmen untuk menginternalisasikan nilai-nilai nasional, kenegarawanan dan kebangsaan, agar moralitas dan akuntabilitas para pemimpin semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Berliana Kartasumah. 2006. *Pemimpin Adiluhung: Genealogi Kepemimpinan Nasional*. Jakarta: Mizan Media Utama.

BI Purwantari & Yohan Wahyu, 2012, "Bayangan Krisis Kepemimpinan", dikutip dari http://nasional.kompas.com/read/2012/09/03/08510219/ Bayangan. Krisis. Kepemimpinan

Husni Kamil Malik, 2013, *"Diperkirakan Partisipasi Pemilu 2014 Hanya 54 Persen"*, dikutip dari http://www.riauposhariini.com/2013/03/diperkirakan-partisipasi-pemilu-2014.html

Kiki Syahnakri, 2008. *Aku Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan dan Kebangsaan*. Krisis Kenegarawanan. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Luthfi Assyaukanie,2012, *"Mencari Negarawan"*, dikutipdari http://jakarta45.wordpress.com/2012/12/19/kepemimpinan-mencari-negarawan-dan-kepemimpinan-transformational/

M. Alfan Alfian, 2009. *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT.Gramedia

Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat. 2010. *Analisis terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum*.Purwokerto: FH Unsoed.

Sudijono, Sastroatmodj.1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Press.

Modul BS. Ketahanan Nasional, Lemhannas RI.

Modul BS. Kepemimpinan, Lemhannas RI.

http://news.detik.com/read/2013/03/15/203521/2195547/10/tingkat-golput-dalam-pilgub-sumut-lebih-dari-50-persen

http://kabar4.com/read/2013/03/03/tingkat-partisipasi-pilgub-masyarakat-di-kota-bekasi-hanya-4818-persen/

http://www.antarajawabarat.com/lihat/cetak/29879

http://mediacenter.kpu.go.id/berita/1202-9-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu.html

Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi guna Memperkokoh Ketahanan Nasional

Dr. Ati harmoni
Peserta PPRA LIII Lemhannas RI

I. Pendahuluan

Ketahanan nasional akan sangat menentukan Indonesia dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi nasional, karena itu semua entitas nasional *(national entities)* harus bertanggungjawab dalam usaha-usaha mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan modal utama agar tercapainya stabilitas nasional yang akan menjamin terselenggaranya segenap agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan, berdayaguna, berhasilguna, dan kompetitif. Pembangunan Indonesia tercatat dalam beberapa tahun ini telah berhasil menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Dalam statistik, Indonesia pernah tercatat sebagai negara kedua di dunia dalam peringkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Hal ini menjadi prestasi yang banyak dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Namun demikian data statistik yang lain, sayangnya, masih menunjukkan kenyataan yang bertolak belakang. Ketimpangan terjadi secara

multidimensi yakni antar-wilayah, antar-sektor, dan antar-kelompok pendapatan (Samhadi, 2014).

Kompas, Senin, 1 Juni 2015, menulis *headline* pada halaman pertamanya "Pancasila Masih Sebatas Retorika." Pancasila hingga saat ini masih sebatas retorika yang hangat diperbincangkan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni. Kompas menyoroti pentingnya keteladanan aparat dan perlunya berbagai langkah strategis untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[1] Pada halaman yang sama, Kompas memuat hasil jajak pendapat tentang pelaksanaan Pancasila yang menunjukkan bahwa banyak hal belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.[2]

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa masih ada persoalan di dalam pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, di antaranya disebabkan oleh disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila dan memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Di tengah pembangunan yang gencar dilakukan, Pancasila terkesan tidak lagi dijadikan acuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku masyarakat, terutama para penyelenggara negara - yang merasa tidak malu memperlihatkan praktik-praktik korupsi, kolusi, konspirasi, suap-menyuap, dan perilaku lain sejenisnya merupakan wujud penyimpangan nilai-nilai substansial dari Pancasila yang terkait dengan karakter bangsa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini bermaksud memberikan gambaran tentang pendidikan karakter bangsa sebagai salah satu upaya dalam memperkokoh ketahanan nasional Indonesia. Penulisan dibatasi pada pedidikan karakter bangsa di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat peran perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pembangunan Indonesia di segala bidang. Lulusan perguruan tinggi diharapkan sudah siap terjun ke tengah masyarakat dengan kompetensi unggul dan juga karakter bangsa kuat. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa yang sesuai Pancasila serta konsensus dasar Indonesia lainnya, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

II. Pembahasan

Agenda reformasi politik dan birokrasi, reformasi ekonomi, dan reformasi hukum yang telah dimulai sejak 1998 harus diikuti dengan reformasi kebudayaan, yaitu reformasi kualitas manusia menjadi manusia ideal yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu cita-cita kehidupan bangsa yang cerdas. Agar menjadi cerdas, maka manusia dan bangsa Indonesia haruslah terdidik dengan baik, yaitu melalui pendidikan yang bermutu, relevan, dan merata. Pendidikan nasional yang diselenggarakan untuk itu, menurut Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945, tidak lain adalah pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

a. Karakter Bangsa

Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Inggris, *character*, yang berarti watak atau sifat. Karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak (Koesoema, 2007). Karakter terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian karakter akan menampilkan sikap dan perilaku yang didorong dari dalam (sebagai *inner power*) untuk menampilkan dan mewujudkan hal-hal yang terpuji.

Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, karakter didefinisikan sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Kualitas karakter yang tinggi dari masyarakatnya akan menumbuhkan kualitas bangsa tersebut. Menurut Kartadinata (2013), karakter bangsa bukan agregasi karakter perorangan, karena karakter bangsa harus terwujud dalam rasa kebangsaan yang kuat dalam konteks kultur yang beragam. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk kemajuan Negara Republik Indonesia, diperlukan karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Iptek berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif meliputi: 1) bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, 4) bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, dan 5) bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Dari penggalian nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam konstitusi UUD NRI 1945 diperoleh 3 (tiga) nilai utama yang cukup signifikan dalam

menentukan perjalanan kehidupan nasional di era reformasi, yaitu 1) nilai demokrasi, mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan, 2) nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum, dan 3) nilai ketaatan hukum, yaitu bahwa setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang belaku.

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhanna Dharmma Mangrva merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia yang menyadari bahwa keberadaannya sebagai bangsa yang berbeda-beda tetapi satu jua, merupakan suatu kebenaran yang tidak mendua dalam mengupayakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan nasional tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa-bangsa lain. Lemhannas RI merumuskan 3 (tiga) nilai utama yang terkandung dalam sesanti tersebut, yaitu 1) nilai toleransi, 2) nilai keadilan, dan 3) nilai gotong royong.[3]

NKRI sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Makna yang terkandung dari kata "bersatu" adalah bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan serta agama telah menyatukan dirinya dalam ikatan kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang disatukan oleh laut menjadi satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Deklarasi Juanda Tahun 1957 menegaskan bahwa bentuk NKRI adalah negara kepulauan yang berorientasi pada konsepsi Wawasan Nusantara. Terdapat 3 (tiga) nilai utama dalam NKRI yang dirumuskan oleh Lemhannas RI, yaitu 1) nilai kesatuan wilayah, 2) nilai persatuan bangsa, dan 3) nilai kemandirian.[4]

b. Pentingnya Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan nasional pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Karena itu pembangunan yang dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara haruslah pembangunan yang berkelanjutan. Namun hasil pembangunan selama ini belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketimpangan antar-kelompok pendapatan, misalnya, menunjukkan fakta peningkatan pangsa kue kelompok 20% terkaya dalam distribusi pendapatan nasional ternyata dibarengi dengan penciutan pangsa 40% penduduk termiskin. Efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) tak terjadi, yang terjadi adalah efek muncrat ke atas (*trickle up effect*). Dari sisi penguasaan aset, sekitar 70% aset ekonomi berupa tanah, tambak, kebun, dan properti Indonesia dikuasai oleh hanya 0.2% penduduk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Fakta ketidakmerataan multidimensi ini sangat mencederai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketahanan nasional, sebagai kondisi dinamik bangsa yang berisi ketangguhan dan keuletan sulit terwujud dengan ketimpangan ekonomi seperti ini.

Ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas adalah modal untuk mampu menciptakan ketahanan nasional yang

tangguh, yang mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Pada aspek demografi, kompetensi sumber daya manusia (SDM) nasional saat ini cukup memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) SDM Indonesia sesuai dengan Laporan *United Nation Development Programme* (UNDP) sebesar 0.629 di tahun 2012, berada pada ranking 121 dari 187 negara. IPM antarwilayah Sumatera dan Jawa-Bali dengan Nusatenggara-Maluku-Papua masih relatif tinggi (Fajar, Yuliana, dan Rustiono, 2014). Fakta ini jelas sangat bertentangan dengan salah satu tujuan nasional yakni memajukan kesejahteraan umum. Keterampilan (*skill*) tenaga kerja Indonesia juga sangat rendah. Berdasarkan survei *Asian Productivity Organization* 2004, dari setiap 1000 tenaga kerja Indonesia hanya 4.3% yang tergolong terampil.[5] Dengan tingkat keterampilan demikian akan sulit bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku efektif tahun 2016 yang akan datang. Ketahanan nasional yang tangguh sulit dicapai dengan kondisi kualitas SDM seperti itu karena salah satu prasyarat ketahanan nasional adalah ketangguhan dan keuletan SDM.

Hasil jajak pendapat tentang pelaksanaan Pancasila yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa publik secara umum menilai kondisi masyarakat Indonesia semakin buruk, terutama pada kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, persatuan bangsa di atas kepentingan golongan, kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa, serta pada keadilan ekonomi dan keadilan hukum. Jajak pendapat memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah pada beberapa hal masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Publik menilai 75% sikap dan perilaku elite-elite politik dalam menyelesaikan persoalan bangsa belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.[6] Kompas juga menunjukkan hasil jajak pendapat yang menilai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada lembaga yang ada dan hasilnya lembaga yang dinilai paling lemah adalah Partai Politik, disusul DPR, Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian. Secara institusional, TNI dan KPK dipandang lebih kuat dalam pelaksanaan Pancasila.[7]

Kondisi bangsa Indonesia yang pluralistik dengan keberagaman suku, bahasa, budaya, dan geografis, berpotensi kuat untuk munculnya konflik yang akan melemahkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kecenderungan ini berpotensi mendorong timbulnya perilaku masyarakat yang radikal dan anarkis dalam menyikapi sebuah permasalahan, yang akan mempertajam konflik horizontal antarkelompok. Kondisi alamiah bangsa Indonesia tersebut ditambah kurangnya keteladanan dari para pemimpin nasional membuat persoalan karakter bangsa menjadi semakin relevan.

Pembangunan karakter bangsa tidak akan terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari tingkat global, regional, maupun nasional. Globalisasi dunia telah berpengaruh pada munculnya berbagai pertemuan dan gesekan budaya. Gesekan-gesekan budaya yang terjadi tidak hanya berpengaruh pada budaya itu sendiri tetapi dapat berpengaruh pula pada aspek-aspek lain, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan

dan kemananan. Jika kondisi ini tidak disikapi dengan bijaksana maka akan berdampak pada sikap dan perilaku anak bangsa yang dapat mengarah pada degradasi etika, moral dan wawasan kebangsaan. Derasnya arus globalisasi yang diperkuat teknologi komunikasi dan informasi memunculkan kekhawatiran bahwa konsumerisme, hedonisme, dan bebas liberalis dinilai menjadi ancaman seirus yang dapat menggerogoti nilai Pancasila[8]. Untuk itulah Bangsa Indonesia perlu mengembangkan pendidikan karakter bangsa, terutama di tingkat perguruan tinggi, yang dapat memperkokoh ketahanan nasional.

c. Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan rumusan mengenai kualitas manusia modern yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh sebab itu rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar pengembangan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan Karakter bangsa adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/ atau kelompok yang unik, baik sebagai warga Negara yang berazaskan pada nilai-nilai dasar pancasila. Nilai-nilai dasar pancasila itu harus terimplimetasi dalam kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI (integrasi nasional).

Harapan terhadap SDM yang berkualitas untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh adalah pada pendidikan yang juga berkualitas. Pendidikan yang bukan hanya sarana transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Menurut Syaiful Anam dalam Barnawi dan M. Arifin (2012), dalam pendidikan, peserta didik harus mendapatkan tiga aspek yaitu: 1) Afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis, 2) Kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuandan teknologi, 3) Konatif, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Dengan memberikan ketiga aspek tersebut, karakter peserta didik akan terbentuk sehingga menjadi seseorang yang memiliki pribadi berkarakter.

Pendidikan karakter bangsa secara terintegrasi atau terpadu di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata kuliah. Pada dasarnya kegiatan membangun karakter tidak cukup dengan menyampaikan nilai-nilai karakter yang diyakini mulia kepada

setiap orang sehingga semua orang tahu bahwa ada nilai-nilai karakter baik dan berbeda dengan nilai-nilai karakter yang buruk. Namun nilai-nilai karakter itu juga harus dipastikan dapat dipahami dengan baik, diinternalisasi dalam hati dan pikiran sehingga menjadi nilai yang diyakini dan dipraktikkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Di Indonesia, pendidikan karakter bangsa kembali menjadi topik hangat sejak 2010. Pembangunan budaya dan karakter bangsa dicanangkan oleh Pemerintah dengan diawali 'Deklarasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa' sebagai gerakan nasional pada Januari 2010. Hal ini ditegaskan ulang dalam Pidato Presiden pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2010. Sejak itu, pendidikan karakter menjadi perbincangan di tingkat nasional. Munculnya Deklarasi tersebut disinyalir akibat kondisi bangsa kita yang menunjukkan perilaku antibudaya dan antikarakter (Marzuki, 2013). Perilaku antibudaya bangsa tercermin di antaranya dari memudarnya sikap kebinekaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia, di samping kuatnya pengaruh budaya asing di tengah-tengah masyarakat. Adapun perilaku antikarakter bangsa di antaranya ditunjukkan oleh hilangnya nilai-nilai luhur yang melekat pada bangsa Indonesia, seperti kejujuran, kesantunan, dan kebersamaan, serta ditandai dengan munculnya berbagai kasus kriminal (Marzuki, 2013).

Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (Pemerintah Republik Indonesia, 2010), disebutkan bahwa bentuk kegiatan pada program pendidikan karakter bangsa dalam konteks mikro, dapat dibagi menjadi empat, yakni: kegiatan belajar-mengajar; kegiatan kehidupan keseharian di satuan pendidikan; kegiatan ekstra-kurikuler; kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Di perguruan tinggi empat pendekatan tersebut dapat dilakukan. Namun, patut diperhatikan bahwa mengimplementasikan pendidikan karakter bangsa pada mahasiswa membutuhkan strategi khusus. Selain karena mahasiswa merupakan insan akademis yang kritis, pendidikan karakter juga unik karena yang dibahas adalah manusia. Vashdev (2012) menyebutkan manusia adalah makhluk kebiasaan. Disebut demikian, karena sistem kepercayaan (*belief system*), nilai (*value*), aturan (*rules*) atau sifat yang ada dalam diri manusia, semuanya terbentuk dari pengalaman atau kebiasaan mereka di masa lalu. Sebagai peserta didik di perguruan tinggi, mahasiswa telah memiliki pengalaman dan kebiasaan yang beragam. Kondisi tersebut telah membentuk karakter mereka.

Mengacu pada konteks mikro pengembangan karakter (Pemerintah Republik Indonesia, 2010) dan ilustrasi yang digambarkan oleh Bendesa (2011), pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi, dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter. Pembiasaan dalam kehidupan keseharian di perguruan tinggi dapat terintegrasi ke dalam budaya perguruan tinggi (kampus) atau budaya organisasi. Sementara, implementasi pendidikan karakter bangsa dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk aktivitas

ko-kurikuler dan/atau ekstra-kurikuler, seperti: pecinta alam, olah raga, karya ilmiah, seni, dan kerohanian. Selain itu, penerapan pembiasaan kehidupan keseharian dalam rangka pendidikan karakter bangsa dapat disisipkan dalam setiap interaksi di lingkungan keluarga, asrama, dan masyarakat.

Pada dharma pendidikan dan penelitian, kurikulum dapat dirancang dengan memasukkan karakter bangsa pada setiap mata kuliah yang ada sebagai *hidden curriculum*. Mahasiswa tidak hanya belajar teknis dan pengetahuan pada mata kuliah yang diambilnya tetapi juga muatan karakter, misalnya kerja sama, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, tidak berprasangka, dan sebagainya. Melalui pemberian tugas mandiri dan kelompok, misalnya, mahasiswa belajar tentang tanggung jawab pribadi dan kelompok, disiplin, saling menghargai terlepas mata kuliah apa pun yang diambilnya. Sementara program pengembangan mahasiswa pada dasarnya merupakan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai penunjang kurikuler, yang dirancang sedemikan rupa agar menjadi program yang terintegrasi. Pendekatan yang digunakan adalah berproses, terpadu dan kontinyu.

Ranah pembinaan kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi biasanya terbagi ke dalam pembinaan 1) penalaran, keilmuan dan keprofesian; 2) minat, bakat dan kegemaran; 3) organisasi mahasiswa; 4) sosial kemasyarakatan. Masing-masing ranah memiliki tujuan, seperti menanamkan sikap ilmiah dan profesionalisme; mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta bakat untuk menunjang perkembangan jasmani dan rohani; mengembangkan organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi; mengaktualisasikan hasrat dan kepekaan sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Beberapa contoh implementasi pelaksanaan pendidikan karakter bangsa pada kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi dapat dilihat Tabel 1.

Unesco menyarankan agar pendidikan harus mengandung tiga unsur: belajar untuk tahu (*learn to know*), belajar untuk berbuat (*learn to do*) dan belajar untuk hidup bersama (*learn to live together*). Unsur pertama dan kedua lebih mengarah membentuk *having*, agar SDM mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau *skill*. Unsur ketiga lebih mengarah pada aspek *being* menuju pembentukan karakter bangsa. Unsur-unsur itu menjadi amat penting dalam pembangkitan rasa nasionalisme, penanaman etika berkehidupan bersama, dan termasuk berbangsa dan bernegara, pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungannya. Hal itu merupakan beberapa unsur dari pendidikan karakter melalui belajar untuk hidup bersama.[9] Dalam konteks pendidikan karakter bangsa, kegiatan kemahasiswaan di atas dapat sekaligus menjadi sarana untuk belajar untuk tahu, berbuat, dan hidup bersama.

Tabel 1.
Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa pada Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Nilai yang Dikembangkan	Strategi Kegiatan	Implementasi Kegiatan
1	Penalaran dan Keilmuan	Kejujuran, etika, disiplin, ketangguhan, ketaatan hukum	Pelatihan, pendampingan, workshop, pelaksanaan organisasi mahasiswa (Ormawa), kompetisi	Seminar, lokakarya, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Mawapres, Pimnas, lomba, diskusi, kuliah umum, Kontes robot, kontes jembatan Pekan ilmiah mahasiswa nasional (Pimnas)
2	Minat, Bakat, dan Kegemaran	Sportivitas, kerjasama, estetika, etika, ketangguhan, toleransi, percaya diri	Pelaksanaan ormawa Kompetisi, pelatihan, pendampingan	Pekan olah raga mahasiswa tk daerah/nasional (Pomda/ Pomnas), Pekan seni mahasiswa tk daerah/ nasional (Peksimida/ Peksiminas) Pesparawi, MTQ, Festival, Lomba
3	Organisasi Mahasiswa	Demokrasi, kemandirian, Kejujuran, kepedulian, etika, inovatif, kreatif, moral	Pelaksanaan ormawa, pendampingan, magang, pelatihan	Seminar, lokakarya, diskusi, lomba, PKM, Pimnas, Mahasiswa berprestasi (Mawapres), latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM)
4	Kesejahteraan/ Penunjang/ Sosial Kemasyarakatan	Kebersamaan, kepedulian, Keadilan, Kesopanan, kejujuran, etika, didiplin, kecerdasan, ketangguhan	Pendampingan, pelaksanaan ormawa, kerjasama dengan eksternal kampus terkait	Orientasi mahasiswa, English Day, Student Day, Pameran, Perayaan hari besar keagamaan, bakti sosial, bazaar

d. Pendidikan Karakter Bangsa dan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan, keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara tidak terlepas dari adanya keberadaan dan pengaruh bangsa dan negara lain, baik itu di kawasan regional, maupun global. Interaksi antarbangsa memiliki potensi untuk munculnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam berbagai bentuk. Langsung atau tidak langsung, nyata maupun terselubung. Segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tersebut memerlukan kekuatan bangsa Indonesia untuk dapat mengatasinya. Kekuatan tersebut berupa ketangguhan, keuletan dan kemampuan bangsa Indonesia. Kekuatan tidak dapat diperoleh dengan serta merta melainkan harus dibangun dan dipelihara terus menerus melalui berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan memperkuat karakter bangsa.

Pembangunan karakter bangsa menjadi sangat penting terlebih apabila membaca laporan Kemenpora yang

menyebutkan bahwa terdapat sepuluh masalah karakter bangsa yang menyangkut generasi muda/pemuda (baca: usia mahasiswa), yaitu masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang semakin membudaya, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan pemimpin, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain, penggunaan bahasa Indonesia yang semakin memburuk, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda (narkoba, pornografi, pornoaksi, dan lain-lain), kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing, melemahnya idealisme, patriotisme serta mengendapnya *spirit of nation*, meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme, serta semakin kaburnya pedoman yang berlaku, dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan di perguruan tinggi karenanya harus ditempatkan sebagai upaya membangun kekuatan bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional.

III. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan dan saran berikut:

a. Simpulan

Pendidikan karakter bangsa di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek afektif, kognitif, dan konatif melalui kegiatan belajar mengajar, kegiatan kehidupan keseharian di satuan pendidikan, kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Strategi khusus diperlukan karena mahasiswa sebagai peserta didik telah memiliki pengalaman dan kebiasaan yang beragam yang diperoleh dari pendidikan dan lingkungan sebelumnya. Pendidikan karakter bangsa yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dapat dirancang sebagai hidden curriculum dan melalui pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan di perguruan tinggi dapat menjadi kunci keberhasilan penyiapan SDM yang berkualitas unggul dan berkarakter kuat yang pada gilirannya akan memperkokoh ketahanan nasional.

b. Saran

Kementerian Ristek dan Dikti bersama-sama dengan Lemhannas RI menyusun nilai-nilai karakter bangsa yang digali dari empat konsensus nasional yang harus dikembangkan oleh seluruh peserta didik di perguruan tinggi. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa harus lebih disosialisasikan dan dioperasionalisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan karena pendidikan karakter bangsa pada hakikatnya adalah kewajiban bersama seluruh bangsa.

IV. Daftar Pustaka

Barnawi dan M.Arifin. 2012. pendidikan karakter untuk generasi Bangsa Indonesia.Insan Media: Jakarta.

Bendesa, K.G. 2011. Model Pendidikan Karakter di Universitas Udayana. Makalah disampikan pada Workshop Institusional Pemantapan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas dan ISS Universitas Udayana Tahun Anggaran 2011. 23 Agustus 2011.

Darmakusuma, 2015. Kepemimpinan Nasional Berbasis Multikultural,

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII, Lemhannas RI, 19 Mei 2015

Kartadinata, S. 2009. Mencari Bentuk Pendidikan Karakter Bangsa. Makalah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._psikologi_pend_dan_bimbingan/195003211974121-sunarya_kartadinata/mencari_bentuk_pendidikan_karakter_bangsa.pdf.

Koesoema, D.A. 2007. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Grasindo. Jakarta. Koesoema, D.A. 2007. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Grasindo. Jakarta.

Marzuki. 2013. Revitalisasi Pendidikan Agama di Sekolah dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Masa Depan. Jurnal Pendidikan Karakter. 3 (1): 64-76.

Membumikan Gagasan Ideal Pancasila, Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 5

Opini Publik tentang Pelaksanaan Pancasila, Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 1

Pancasila masih Sebatas Retorika, Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 1

Pemerintah Republik Indonesia, 2010, Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010 - 2025. Jakarta

Samhadi, Sri Hartati, 2014. "Disparitas dan Ketimpangan: Ketika Agenda Pembangunan Dibajak", dalam Tinjauan Kompas: Menatap Indonesia, 2014 - Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia, Kompas Media Nusantara, pp 94

V. Alur Pikir

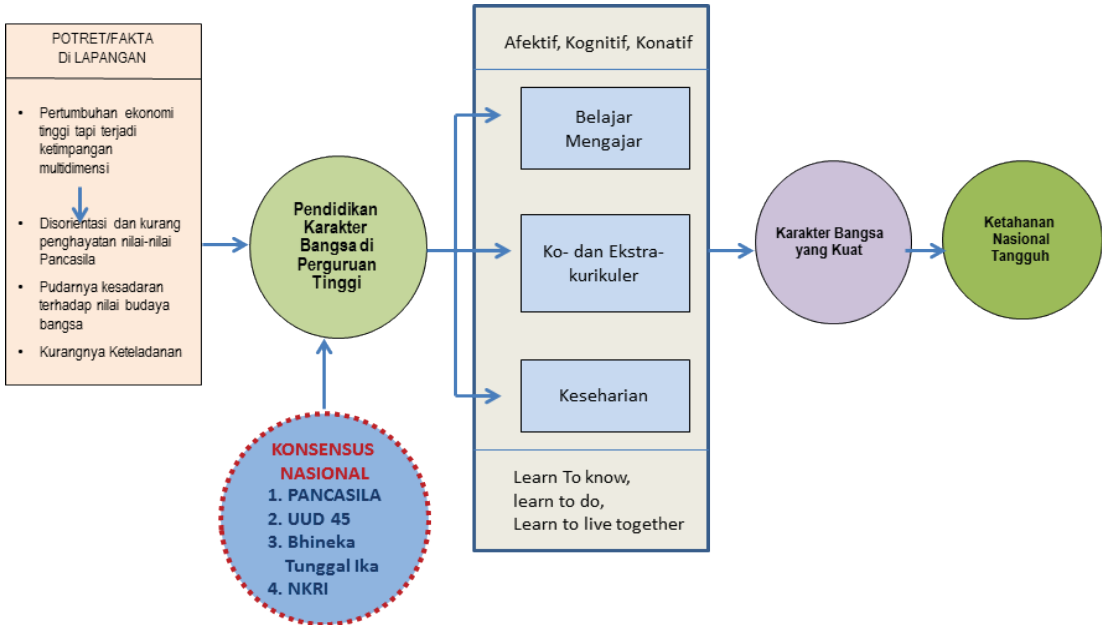

Endnotes

1. Pancasila Masih Sebatas Retorika, Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 1
2. Lihat "Opini Publik tentang Pelaksanaan Pancasila", Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 1
3. Darmakusuma, Kepemimpinan Nasional Berbasis Multikultural, Program Pendidikan Angkatan (PPRA) LIII, Lemhannas RI tanggal 19 Mei 2015
4. Ibid
5. www.beritasatu.com
6. Lihat "Opini Publik tentang Pelaksanaan Pancasila", Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 1
7. Lihat "Membumikan Gagasan Ideal Pancasila", Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 5
8. "Membumikan Gagasan Ideal Pancasila", Kompas, Senin, 1 Juni 2015, hal 5
9. Lihat juga Sukardjo dan Komarudin. Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Tahun 2009. Hal: 76.

[3] Ibid, Hal 13

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional di Bidang Ideologi

Suko Purwantoro, S.IP.,M.M.,M.Sc.
Peserta PPRA LIII Lemhannas RI

I. Pendahuluan.

Ketahanan Nasional *(national resilience)* adalah istilah khas Indonesia yang mulai dikenal sejak awal tahun 1960 dan kemudian semakin populer pada tahun 1965 setelah Pemberontakan G 30 S/PKI. Secara universal, terminologi serupa yang lazim digunakan disebut *"National Power"*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya *"Politics Among Nation"*, Hans mengistilahkan sebuah negara harus memiliki kekuatan nasional yang disebut dengan *"elements of National Power"*. Bangsa Indonesia lebih memilih istilah Ketahanan Nasional karena selaras dengan dinamika perjalanan sejarah yang selama berabad – abad lamanya berhasil mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai Bangsa.

Mengapa Bangsa Indonesia bisa bertahan? Tentu saja bukan karena Bangsa Indonesia kuat, tetapi lebih dikarenakan memiliki ketahanan sebagai sebuah bangsa. Ketahanan Nasional, sebagai *element of national powers* Indonesia, ditopang oleh ketahanan di bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan (hankam). Komponen ideologi, atau yang disebut dengan ketahanan ideologi, didefinisikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan

yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan (ATHG) yang datang dari luar atau dari dalam, yang langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pada saat ini, nilai-nilai Pancasila yang merupakan inti dari ketahanan ideologi mendapat tekanan globalisasi akibat dari fenomena di berbagai belahan dunia yang mampu berinteraksi antara satu bagian dengan bagian lain termasuk kultur masyarakat dunia dengan tanpa dibatasi waktu, jarak, dan ruang. Fenomena ini sudah sampai pada suatu kondisi dimana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain lintas batas negara, termasuk Indonesia. Tekanan globalisasi yang membawa nilai-nilai luar secara langsung akan berinteraksi dengan nilai-nilai Pancasila yang berisikan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia seperti, kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta solidaritas antar umat beragama, antar etnis, dan antar budaya. Pada saat ini, nilai-nilai tersebut semakin memudar dan semakin melemah karena terpengaruh oleh nilai-nilai luar seperti liberalisme dan individualisme. Pengaruh ideologi asing juga membawa dampak terhadap bergesernya karakter individu dan/atau masyarakat yang semula berorientasi kepada kepentingan umum, bangsa, dan negara berubah menjadi kepentingan pribadi dan/atau golongan serta Bangsa yang berkepribadian ramah tamah, santun, dan berbudi luhur kini cenderung berubah ke arah tindakan yang sebaliknya.

Uraian diatas menjadi indikasi bagi Bangsa Indonesia bahwa nilai-nilai luhur Pancasila sebagai jati diri Bangsa telah tergerus erosi tekanan global s-+ehingga menjadi faktor yang memperlemah ketahanan nasional dibidang Ideologi. Menyikapi hal tersebut, maka Bangsa Indonesia perlu menempuh langkah-langkah konkrit guna menjawab tantangan tentang **"Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional dibidang ideologi ?"**.

II. Permasalahan implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Ketahanan Nasional dibidang Ideologi dan Solusi pemecahannya.

Penyimpangan terhadap implementasi dan pemahaman nilai-nilai Pancasila mengalami ekskalasi penurunan yang cukup tajam sehingga potret dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masyarakat dewasa ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Masih sering sekali terjadi konflik antara umat beragama baik sesama agama maupun berbeda agama. Pada sepanjang tahun 2011 tercatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan, yang menyebar di 17 wilayah pemantauan dan wilayah lain di luar wilayah pemantauan.[1] Konflik agama di Indonesia yang cukup

menonjol seperti yang terjadi di Ambon dan Poso yang hingga kini masih terjadi, bahkan di beberapa tempat di Indonesia masih sering terjadi seperti kasus antara Islam Syiah dengan Sunni. Terjadinya konflik agama di Indonesia lebih disebabkan karena nilai-nilai KeTuhanan YME telah keluar dari jalurnya. Dunia luar melihat bahwa konflik sosial yang melibatkan agama di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi[2].

b. ***Implementasi Kemanusiaan yang adil dan beradab.*** Penyimpangan nilai kemanusiaan yang dapat dilihat dari kesederajatan dalam hukum dan kesamaan dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, ada beberapa hal yaitu penjatuhan hukuman percobaan terhadap nenek Minah yang memetik 3 buah kakao di perkebunan dan nenek Asiani yang mengambil kayu milik perhutani dibandingkan dengan para koruptor yang hukumannya dirasakan masih sangat ringan. Sedangkan dalam segi kesamaan hak dalam kehidupan sosial, dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran terhadap HAM, salah satunya adalah kasus Mesuji di Lampung.

c. ***Implementasi Persatuan Indonesia.*** Pada kenyataannya, nilai-nilai tersebut di beberapa daerah sudah mulai ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya konflik yang terjadi di Indonesia baik yang berlatar belakang sumber daya alam[3] dan agrarian. Data grafik konflik agraria menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila khususnya sila Persatuan Indonesia telah terjadi pergeseran yang signifikan. Dengan berubahnya nilai-nilai tersebut maka konflik-konflik berkembang ke berbagai bidang dan intensitasnya meningkat. Contohnya adalah perkelahian antar kampung maupun perkelahian pelajar yang banyak terjadi di beberapa daerah. Permasalahan lain adalah masalah implementasi nasionalisme, kurangnya kesadaran masyarakat yang hanya sekedar untuk memasang bendera di depan rumah, kantor atau pertokoan pada tanggal 17 Agustus 2014 dengan berbagai dalih.

d. ***Implementasi Kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan.*** Dari sudut pandang kebebasan yang taat hukum dan konsensus nasional, pada kenyataanya dari sisi perumusan regulasi misalnya, masih banyaknya Perda yang melanggar aturan demi euforia otonomi daerah yang tidak lagi memperhatikan hukum atau aturan yang berlaku. Sedangkan dari sudut pandang Konsensus Nasional, beberapa elit politik telah meninggalkan konsensus nasional dimana wakil-wakil rakyat mengingkari nilai-nilai Pancasila sendiri. Sebagai contoh, lunturnya permusyawaratan untuk mencari jalan keluar saat *dead lock* menjadi *voting* dan dalam sistem yang dibuat oleh DPR RI pasca reformasi menjadikan keterwakilan masyarakat minoritas hampir tidak ada. Demikian pula dengan diputuskannya pemilihan langsung

terhadap Presiden dan kepala daerah, menunjukkan bahwa salah satu nilai pada Sila ke 4 telah diingkari, karena nilai-nilai pada sila ke 4 mengamanatkan untuk diadakannya permusyawaratan/ perwakilan yang dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan kelompok minoritas pada NKRI. Demokrasi yang ada di Indonesia sudah mendekati liberal sehingga mekanisme pengambilan keputusan sudah mengarah kepada liberalisme, bahkan terjadi anarkisme pada saat pengambilan keputusan.

e. ***Implementasi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*** Pada kenyataannya, jumlah orang miskin sangat banyak, sementara di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga cukup ironis bila masyarakat Indonesia masih cukup banyak yang miskin.[4] Apabila dilihat dari indikator ekonomi, dari segi kemakmuran menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berkurang. Namun apabila dilihat lebih dalam pada sistem perekonomian Indonesia, masih menunjukkan bahwa telah keluar dari nilai-nilai Pancasila.

Terlebih lagi sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998 telah meruntuhkan kekuasaan Orde Baru yang telah berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Selama kekuasaan Orde Baru, Pancasila menjadi suatu simbol yang disakralkan. Akibatnya ketika Orde Baru runtuh, implementasi Pancasila pun mengalami eskalasi penurunan yang cukup tajam. Bahkan, sebagian dari komponen bangsa lintas generasi yang merupakan para pemegang estafet dan pewaris bangsa, menganggap Pancasila merupakan bagian dari Orde Baru, sehingga Pancasila ditinggalkan oleh mereka yang tidak memahami sepenuhnya hakekat tentang Pancasila. Masyarakat, terutama generasi muda, seolah-olah alergi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan Orde Baru, termasuk terhadap Pancasila. Nilai-nilai Pancasila terkikis hampir di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dianggap kuno, tidak modern, dan sudah ketinggalan zaman sekaligus dijauhi karena dianggap produk dan alat Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dan tentu saja kondisi ini juga *by design* oleh kelompok tertentu yang selama dalam kekuasaan Orde Baru mereka termarjinalisasikan.

Pelajaran Pancasila yang sebelumnya menjadi bagian integral kurikulum pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, dihilangkan. Sebagai akibatnya, moral bangsa ini menjadi tidak terarah karena tidak mempunyai pegangan yang dapat membentengi diri dari nilai-nilai asing yang masuk dari berbagai media. Tidaklah heran apabila ada pelajar bahkan pejabat yang tidak mengenal Pancasila dan bahkan tidak dapat mengingat seluruh sila dalam Pancasila. Sehingga tidaklah heran kecenderungan yang terjadi saat ini berupa persaingan untuk memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala macam cara, menisbikan kepentingan rakyat luas dan mengabaikan pencapaian tujuan nasional dalam memajukan kesejahteraan secara umum.

Walaupun terkesan indoktrinasi oleh sebagian masyarakat Indonesia, pada masa Orde Baru, masyarakat terutama generasi muda memiliki pegangan dalam mengamalkan Pancasila yaitu dengan adanya P4. Apabila di telaah butir demi butir di dalam P4, seluruhnya tidak ada yang salah dan buruk. Dengan dihapuskannya P4, masyarakat, terutama generasi muda menjadi kehilangan pegangan dalam menjalankan kehidupan keseharian. Memang Pancasila tetap ada, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seolah terlarang untuk diamalkan.

Lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini sebagaimana yang digambarkan di atas, selain disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dampak negatif dari tekanan globalisasi, juga disebabkan oleh berbagai berbagai faktor internal yang berasal dari dalam negeri sendiri. Diantaranya adalah *lemahnya ketertarikan masyarakat dewasa ini terhadap nilai - nilai Pancasila dan yang kedua adalah secara regulasi belum adanya dasar hukum yang mengatur tetang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara benar*.

Sebagian komponen bangsa menganggap nilai-nilai Pancasila kurang menarik dibandingkan nilai-nilai luar yang mereka anggap lebih cocok untuk dijadikan nilai tertentu pada diri mereka, seperti nilai-nilai individualistis dan persaingan bebas untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam dunia usaha. Bahkan pada beberapa hal, nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai nilai yang identik dengan Orde Baru sehingga setiap hal yang berbunyi Pancasila akan dianggap sebagai bangkitnya Orde Baru. Saat ini, penanaman nilai-nilai Pancasila hanya sebatas diajarkan namun tidak pada tataran dihayati apalagi diimplementasikan. Selanjutnya, pasca dikeluarkannya TAP MPR RI No XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor No II/MPR/1978 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara, semenjak itu tidak ada lagi lembaga yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan Pancasila. Munculnya persoalan sehingga nilai-nilai Pancasila mengalami penurunan diakibatkan karena tidak ada lembaga yang secara khusus menangani berbagai hal yang berhubungan dengan Pancasila. Tidak terdapat lagi pedoman implementasinya dan tidak tergambarkan dengan jelas tentang sanksi yang tegas bagi individu yang tidak mengimplementasikan nilai nilai Pancasila dengan benar.

Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hakikatnya mengajarkan nilai luhur yaitu hidup rukun, tenggang rasa, dan gotong royong walaupun berbeda dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi memiliki persatuan dan dipersatukan oleh harkat kemanusiaan yang sama untuk berjuang mengisi kemerdekaan secara demokratis, adil, dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tertanamnya nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia memiliki keyakinan kebenaran landasan berpijak dalam menjalankan kehidupan

berbangsa dan bernegara sehingga secara langsung akan meningkatkan ketahanan nasional di bidang ideologi. Terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila secara benar akan berdampak pada penurunan skala konflik, seperti konflik agama, perkelahian anak sekolah, konflik lahan, dan konflik-konflik lain yang umumnya mengalami peningkatan pasca reformasi; peningkatan toleransi, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa; peningkatan iklim demokrasi dan kedewasaan kehidupan politik; dan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat. Guna mendukung terimplementasikannya nilai – nilai Pancasila secara benar dalam rangka terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di bidang ideologi, maka Pemerintah dengan dukungan seluruh komponen Bangsa harus bekerja sama, bahu-membahu melakukan langkah – langkah konkrit. Diantaranya Pemerintah harus menetapkan kebijakan publik dan bersifat nasional yaitu **"Penguatan implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional di bidang ideologi "**

Berdasarkan rumusan kebijakan tersebut, maka perlu ditempuh langkah – langkah kongkrit berupa strategi terpilih dalam implementasi Nilai-Nilai Pancasila yaitu melalui pengembangan pemahaman nilai-nilai Pancasila, serta pembuatan regulasi dengan penjabarannya adalah sebagai berikut :

Pertama, penyebarluasan dan inseminasi nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai tersebut menjadi lebih menarik dibandingkan nilai-nilai luar. Dengan pembaruan penyebarluasan dan inseminasi non doktriner nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai tersebut akan lebih menarik dan meyakinkan seluruh anak bangsa bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang paling tepat untuk bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila adalah lebih baik dibandingkan nilai-nilai luar yang ada. Tujuan dari strategi ini adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi lebih menarik, aplikatif, dan mudah dipahami sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih meyakini nilai-nilai murni bangsa Indonesia.

Kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang penanaman nilai-nilai Pancasila dan menunjuk ataupun membentuk badan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian Pancasila. Strategi ini berorientasi pada pembuatan regulasi sebagai landasan berpijak dalam implementasi nilai-nilai Pancasila pada seluruh sendi kehidupan. Tujuan dari strategi ini adalah adanya regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam mendorong untuk diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan adanya lembaga yang secara resmi ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan Pancasila. Agar strategi-strategi yang telah ditentukan dapat direalisasikan secara maksimal sebagai langkah nyata, perlu disusun upaya-upaya sebagai berikut :

a. Upaya dalam rangka penyebarluasan dan inseminasi nilai-nilai Pancasila**.** Agar tujuan dari strategi ini yaitu menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi lebih menarik, aplikatif, dan mudah dipahami sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih

meyakini nilai-nilai murni bangsa Indonesia, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1) Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Lemhannas RI, Kementerian Agama, Kementerian, Komunikasi dan Informasi), Perguruan tinggi negeri dan swasta serta sejarawan melakukan riset dan kajian ilmiah secara terpusat serta mencari formulasi yang tepat bentuk dan model pemahaman baik kepada dunia pendidikan maupun kepada masyarakat umum. Setelah dilakukan pengkajian secara terpusat, dilakukan integrasi untuk mendapatkan formulasi yang tepat model ataupun bentuk-bentuk pemahaman dari nilai-nilai Pancasila.
2) Pembuatan formulasi pemahaman nilai – nilai Pancasila kepada seluruh komponen bangsa dengan metoda yang sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran: ***Pertama***, kepada masyarakat umum, harus dapat dirumuskan formulasi pemahaman yang tepat kepada masyarakat umum seperti penggunaan media cetak maupun media elektronik baik langsung seperti *talk show* maupun yang tidak langsung seperti pemahaman melalui film-film yang mendidik ke arah etika dan kultur-kultur yang baik yaitu upaya mengingatkan sejarah perjuangan, *local wisdom* (kearifan lokal) melalui media-media yang ada baik media yang bersifat lokal maupun nasional. Oleh karenaitu, pemahaman kepada masyarakat harus diperbanyak melalui: *talk show*, penayangan film – film yang mendidik, pembuatan film kartun kebangsaan untuk anak-anak dan pendidikan usia dini, pembuatan *games virtual* baik yang bersifat *offline apps* maupun *online* yang bernuansa kebangsaan serta membangun gerakan – gerakan untuk mencintai Pancasila ataupun gerakan untuk kembali kepada norma-norma atau nilai-nilai Pancasila. ***Kedua***, kepada dunia pendidikan, harus dapat dirumuskan formulasi pemahaman kepada dunia pendidikan yang meliputi:
   - besaran waktu yang akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum harus jelas, khususnya pelajaran tentang Pancasila, yang dimasukkan secara langsung maupun pada materi pelajaran lain yang diberikan secara tidak langsung;
   - materi yang akan diberikan baik kepada pendidikan tinggi, menengah, pertama maupun pendidikan dasar. Materi yang ada tersebut juga harus sudah realistik dan digabungkan dengan pelajaran lainnya seperti pelajaran sejarah, budi pekerti, Pancasila sendiri, termasuk kultur-kultur baik

yang diterapkan secara harian seperti mencium tangan guru, mendengarkan dengan penuh hormat, dan sebagainya;

- pemberian materi harus menggunakan pendekatan *contextual learning* yaitu pendidikan dengan menggunakan pendekatan mengarah kepada pembelajaran praktek
- materi pelajaran harus juga memuat budaya-budaya lokal yang dikemas dengan praktek kegiatan agar dapat lebih mudah dipahami dan pada akhirnya kembali menjadi kultur yang baik
- pemberian pelajaran Pancasila harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan harus selalu melalui proses yang bertahap bertingkat dan berlanjut yang terbagi pada level pendidikan yaitu: Pendidikan Tinggi, Pendidikan Menengah, Pendidikan lanjutan dan Pendidikan Dasar serta Masyarakat umum sebagai upaya pemeliharaan secara meluas.

3) Pengujian dan Sosialisasi. Setelah didapatkan formulasi yang tepat, dilanjutkan dengan pengujian melalui simulasi di perguruan tinggi yang memiliki laboratorium Pancasila dan maupun di lembaga pendidikan yang ada. Maksud dari pengujian adalah untuk menguji apakah formulasi yang diberikan sudah tepat atau belum ataupun menimbulkan permasalahan baru. Setelah dilakukan pengujian, seluruh pihak melakukan sosialisasi rencana kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Diharapkan langkah-langkah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat terhadap nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai tersebut lebih menarik dan lebih baik dibandingkan nilai-nilai luar. Dengan pembaruan nilai-nilai Pancasila, maka nilai-nilai tersebut akan lebih menarik dan meyakinkan seluruh anak bangsa bahwa nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang paling tepat untuk bangsa Indonesia.

4) Pengawasan dan Pengendalian. Agar pelaksanaan peningkatan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat terselenggara dengan baik dan benar serta berkesinambungan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar tidak terjadi penyimpangan ataupun hambatan yang berarti. Pengawasan dan evaluasi menggunakan tolok ukur yang jelas dan melibatkan peran masyarakat luas.

b. Upaya yang dilakukan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan tentang penanaman nilai-nilai Pancasila dan menunjuk ataupun membentuk badan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian Pancasila

dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan mengajukan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah tersebut harus dilakukan dengan pengawasan atas rencana yang telah disepakati. Dengan demikian, upayanya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negri, Kemenkumham, Setneg), Pemerintah daerah, Perguruan tinggi di daerah, dan LSM pemerhati Pancasila dalam melaksanakan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melakukan langkah-langkah:

1) Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negri, Kemenkumham, Sekretariat Negara), Pemerintah daerah, Perguruan tinggi di daerah dan LSM pemerhati Pancasila melakukan penelitian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada untuk mencari relasi antara peraturan perundang-undangan yang ada dari yang tertinggi (UUD NRI 1945) hingga peraturan daerah dengan amanat negara menanamkan nilai-nilai Pancasila dan penunjukan lembaga yang bertanggung jawab. Dari hasil penelitian tersebut, dilakukan penjaringan masukan maupun hal lain yang perlu baik dari masyarakat yang tinggal di perkotaan besar maupun mereka yang tinggal di daerah terpencil mengenai *penanaman* hingga *penanggung jawab* terhadap naik turunnya nilai-nilai Pancasila yang ada dilapangan.
2) Melakukan evaluasi terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dalam hal penanaman dan penanggung jawab terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut berkaitan erat dengan upaya untuk mengukur keterlibatan berbagai pihak yang memungkinkan untuk terlibat dalam upaya penanaman dan penanggung jawab terhadap nilai-nilai Pancasila. Evaluasi difokuskan pada regulasi dan peraturan perundang-undangan dari level UUD NRI 1945 hingga peraturan daerah. Pelaksanaan evaluasi tetap menjunjung asas dan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi intervensi dari pihak luar mengingat integrasi sistem akan berdampak hingga tingkat nasional. Pelaksanaan evaluasi juga tetap mengedepankan pemikiran agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur ataupun hilang.
3) Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, Sekretariat Negara), Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi khususnya yang mempunyai laboratorium Pancasila dan LSM pemerhati Pancasila melakukan harmonisasi regulasi dan peraturan.

- **Regulasi**, diperuntukkan untuk menetapkan pedoman penghayatan nilai-nilai Pancasila dan penunjukan badan yang bertanggung jawab.
  Dari hasil evaluasi, akan dapat diperkirakan bentuk regulasi yang ideal sebagai wujud sinkronisasi (dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang macam). Model harmonisasi tersebut kemudian diseminarkan dengan terlebih dahulu disimulasikan di laboratorium Pancasila (khususnya pada perguruan tinggi yang memiliki laboratorium Pancasila) untuk menguji apakah model harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan keinginan ataupun menjawab permasalahan yaitu tidak adanya pedoman dan lembaga yang bertanggung jawab tentang nilai-nilai Pancasila.
- **Penanggung Jawab**, lembaga yang akan diberikan tanggung jawab.
  Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, Setneg), Pemerintah daerah, Perguruan tinggi di daerah dan LSM pemerhati Pancasila menentukan model ideal lembaga penanggung jawab tersebut dan melakukan pengujian terhadap lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk diberikan tugas dan wewenang tersebut (didapat dari hasil evaluasi).

4) Penentuan model lembaga ideal. Kriteria ideal berisi:
   - kewenangan yang diharapkan adalah dapat memberikan peringatan terhadap setiap pelanggar baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif
   - memiliki anggaran yang cukup
   - memiliki Laboratorium yang didesain untuk melakukan pengujian ataupun pengembangan secara akademis
   - independen atau dibawah presiden (tergantung kajian akademisnya).
   - pengawakannya adalah personel yang memiliki kredibilitas tinggi dan mengerti tentang nilai-nilai Pancasila
   - dinamis dan kreatif
   - mampu mengikuti perkembangan zaman (agar dapat melihat penyimpangan akibat pengaruh luar)
   - mempunyai jaringan perguruan tinggi khususnya yang memiliki laboratorium Pancasila.
5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar tidak terjadi penyimpangan ataupun hambatan yang berarti. Pengawasan dan evaluasi menggunakan tolok ukur yang jelas dan melibatkan peran masyarakat luas.

6) Menyiapkan saran pembentukan Undang-undang (apabila sinkronisasi tidak memungkinkan). Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Negara) dan DPR menyiapkan bahan untuk dibawa pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Saran untuk perubahan ataupun perbaikan berdasarkan kepada hal-hal yang temukan pada langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sebelum saran tersebut diajukan dalam Prolegnas, dilakukan terlebih dahulu pengujian ulang bentuk-bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila dan lembaga penanggung jawab terhadap Pancasila.

III. Penutup.

a. Kesimpulan.

Dari uraian tentang implementasi sila – sila dari Pancasila di atas, dalam perspektif Tannas, ketidakhadiran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan sifat religius, toleransi kemanusiaan, rasa persatuan dan kesatuan, serta kehidupan politik yang tidak sehat sampai dengan timbulnya kesenjangan dan keadilan sosial yang cukup tinggi, sehingga melemahkan kondisi mental bangsa yang berdampak pada lemahnya ketahanan nasional, utamanya di bidang ideologi. Ketidakyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila secara langsung akan melemahkan ketahanan ideologi yaitu rendahnya kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG yang datang dari luar atau dari dalam negeri. Pembiaran terhadap kondisi yang demikian ini, tidak hanya akan melemahkan ketahanan nasional di bidang ideologi saja, tetapi juga akan melemahkan ketahanan nasional di bidang lainnya mengingat terdapat hubungan integral dan holistik diantara keseluruhan gatra. Guna mengeliminasi terjadinya eskalasi penurunan implementasi nilai-nilai Pancasila yang dapat mengancam kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka sebagai solusi perlu ditempuh langkah – langkah penyebarluasan dan inseminasi nilai-nilai Pancasila, membuat peraturan perundang-undangan tentang penanaman nilai-nilai Pancasila, dan menunjuk ataupun membentuk badan yang bertanggung jawab terhadap kelestarian Pancasila.

b. Saran.

Kepada pemerintah pusat agar melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran serta memanggil pimpinan-pimpinan media yang ada, untuk diajak mendewasakan penonton dengan cara memberikan tayangan-tayangan yang bersifat mendidik dan mengurangi tayangan yang tidak ada unsur pendidikan masyarakat. Penyiaran di media, khususnya tayangan televisi, harus proporsional antara pendidikan dengan hiburan, karena media televisi adalah media paling efektif untuk

meningkat kualitas manusia maupun menghancurkannya (pada pemikiran). Hal tersebut karena media televisi lebih banyak menggunakan indra yang akan lebih efektif dalam menstimulasi otak.

Daftar Pustaka

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Landry Haryo Subianto, "Konsep Human Security : Tinjauan dan Prospek", Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXXI/2002, No.1.

Lee Kuan Yew, From Third World To First, Singapore Press Holdings, 2007

Otho H. Hadi, MA, Nation and character building melalui pemahaman Wawasan Kebangsaan, hal 1. Otho H. Hadi, MA adalah Staf Direktorat Politik,Kominkasi dan Informasi Bappenas.

Setiawan , Bonnie. 1999. Peralihan Kapitalisme di Dunia Ketiga. Insist Press

Sidabutar, Suhara Golan. 2008. Makalah Kewaspadaan Nasional: Mewaspadai Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Wingarta, Putu Sastra. 2012. Tenaga Profesional Lemhanas RI bidang Kewaspadaan Nasional:Urgensi Kewaspadaan Nasional dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa.

Yudhoyono, Susilo Bambang. 2006. Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato hari lahir Pancasila, 1 Juni 2006 di JCC Jakarta

Inpres Nomor 10 Tahun 1982 tentang Kewaspadaan Nasional

Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan dalam Negeri

Kep Mendagri Nomor 40 tahun 2001 tentang Penugasan Kepada Dirjen Kesbangpol untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa.

Kepres Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembubaran Bakorstanas yang membina kewaspadaan nasional

Kompas, 08-02-2012 sumber PPNR

Lemhannas RI, Modul BS. Ketahanan Nasional Lemhannas RI PPRA LII, 2014

Lemhannas RI, Modul BS. Pancasila dan UUD NRI 1945 PPRA LII Lemhannas RI 2014

Lemhannas RI, Modul Lemhannas, Bidang Studi/Materi Pokok Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Lemhannas, hal.45

SE Mendagri Nomor 8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataran Ketahanan Bangsa

Surat Pang TNI Nomor B/1305/14/23/ SET tanggal 27 Juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tar Pad Nas kepada Depdagri

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penenangan Konflik Sosial

UUD NRI 1945 Bab XIV Kesejahteraan, Pasal 33, ayat (3)

Endnotes

1. http://www.academia.edu/4900906/POTRET_KONFLIK_BERNUANSA_AGAMA_DI_INDONESIA_Signifikansi_Model_Resolusi_Berbasis_Teologi_Transformatif. Diunduh pada 1 Juni 2015 pukul 08.30
2. http://www.pewforum.org/2014/01/14/religious-hostilities-reach-six-year-high/#countries-with-very-high-government-restrictions-on-religion diunduh pada 1 Juni 2015 pukul 10.00
3. http://huma.or.idpusat-database-dan-informasioutlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012 diuduh tanggal 1 Juni 2015 pukul 10.30
4. www.setneg.go.id diunduh pada 1 juni 2015 pukul 12.51

Penamaan Kodam Cermin Politik Integrasi TNI

Dhia Prekasa Yoedha
Jurnalis Senior

Dinamika Sejarah Kodam

Komando Daerah Militer (disingkat Kodam) adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat. Kodam merupakan kompartemen strategis yang bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat wilayahnya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai kebijakan Panglima TNI. Kodam dipimpin seorang Panglima Kodam atau lazim disebut Pangdam.

Sepanjang sejarah Indonesia, TNI mengalami beberapa kali regenerasi Kodam. Untuk itu sejumlah kodam dibentuk sesuai pendekatan regionalisasi daerah dan wilayah pertahanan. Baik berdasarkan perspektif kesatuan ketahanan kepulauan, pulau, maupun sebagian pulau yang lalu dilebur jadi satu komando. Peleburan sesuai doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang bertumpu pada kebersatuan dan dukungan rakyat setempat melalui berbagai pendekatan teritorial.

Peleburan jadi satu komando itu mirip pola tujuh TT (Tentara dan Teritorium) era revolusi fisik masa perang gerilya 1945-1950. Atau mirip komando dalam arti operasi penumpasan gerakan separatis, seperti DI-TII (Darul Islam-

Tentara Islam Indonesia), RMS (Republik Maluku Selatan), maupun pembrontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta). Sehingga dalam perkembangannya jumlah Kodam di Indonesia sempat mencapai 17 kodam.

Tahun 1985, KSAD Jendral TNI Rudini mereorganisasi 17 kodam (tepatnya 16 Kodam) jadi 9 kodam ditambah satu kodam ibukota. Reorganisasi kompartemen kewilayahan berupa penyederhanaan ini didasari kebutuhan maupun hakikat ancaman saat itu. Sehingga keberadaan kowilhan dan kodam-kodam, terutama di luar Pulau Jawa, dinilai tak efisien lagi dari segi penggunaan dan pemusatan kekuatan, maupun dari sisi anggaran. Khususnya jika ditilik dari kepentingan mewujudkan postur pertahanan yang efektif dan praktis.

Selebihnya ada beberapa kodam lain yang tetap dipertahankan sebagai unit komando pertahanan seperti semula, hanya dengan penyesuaian nomenklatur atau nomer urut penyebutan komandonya.

Contoh, ketika itu Kodam I/ Iskandar Muda bersama Kodam II/Bukit Barisan dan Kodam III/Tujuh Belas Agustus (Kodam III/17 Agustus) yang ketiga-tiganya semula eks TT I-SU pun dilebur menjadi Kodam I/Bukit Barisan. Sementara Kodam IV/Sriwijaya yang juga berada di Pulau Sumatera dan eks TT II hanya dialihkan menjadi Kodam II/ Sriwijaya;

Lalu Kodam IX/Tanjung Pura di Kalimantan Barat bersama Kodam X/ Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan dan Kodam XII/Mulawarman di Kalimantan Timur dilebur menjadi Kodam VI/ Mulawarman. Ketiga Kodam ini semula merupakan eks TT VI – Kalimantan.

Di Sulawesi, Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XIV/Hasanuddin sesuai Surat Keputusan Nomor: Skep/131/11/1985 KSAD tertanggal 12 Februari 1985, dilebur menjadi Kodam VII/Wirabuana.

Juga Kodam XVI/Pattimura di Maluku dan Kodam XVII/Cendrawasih di Irian Jaya, dilebur menjadi Kodam VIII Trikora yang membawahi wilayah Malirja (Maluku dan Irian Jaya).

Sementara Kodam XV/Udayana yang membawahi gugus kepulauan Sunda Kecil, baik Bali maupun kepulauan di Nusa Tenggara Barat dan Timur, saat reorganisasi 1985 tetap dipertahankan dengan mengganti nomenklaturnya menjadi Kodam IX/Udayana yang membawahi pula Komando Daerah Pertahanan (Kodahan) Timor Timur yang berstatus khusus melebihi Korem.

Kelima kodam tersebut dari kodam yang ke-13 hingga 17 di Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Irian ini pada Agustus 1950 semula bagian dari TT VII/Indonesia Timur dengan Panglima Kolonel Inf A.E. Kawilarang. Sesuai Kompas (Komando Pasukan) cikal bakal resimen infantri di regional masing-masing, maka secara bertahap TT VII/Indonesia Timur mekar menjadi Komando Daerah Militer (KDM) atau yang kemudian dijadikan kodam.

Perkembangan pesat suatu Kompas karena dinamika territorial dan kondisi tertentu di sebagian wilayah TT VII/Indonesia Timur ini kadang menciptakan semacam dualisme komando situasional, Situasi dualisme itu kemudian diatasi antara lain dengan pemekaran KDM.

Contoh reorganisasi Angkatan Darat tanggal 26 Mei 1957 untuk mengatasi

dualisme komando itu ditempuh dengan melikuidasi TT-VII dan KODPSST (Komando Daerah Pertempuran/ Pengamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara). Lalu dibentuklah empat kodam. KDM SST (Sulawesi Selatan dan Tenggara) di Makassar jadi Kodam XIV/ Hasanuddin. KDM-SUT (Sulawesi Utara dan Tengah) di Manado jadi Kodam XIII/Merdeka. KDM-MIB (Maluku dan Irian Barat) di Ambon, jadi Kodam X/ Trikora (yang kelak dimekarkan lagi jadi Kodam XIV/Pattimura, dan Kodam XVII/Cendrawasih), dan KDM-NT (Nusa Tenggara) di Denpasar jadi Kodam XVI/ Udayana.

Seperti Kodam Udayana dalam reorganisasi 1985 yang hanya berganti nomer, begitu pula empat kodam di Pulau Jawa, Kodam V Jayakarta, Kodam VI/Siliwangi; Kodam VII/ Diponegoro; dan Kodam VIII/Brawijaya; beralih nomenklatur menjadi Kodam III/Siliwangi; Kodam IV/ Diponegoro; Kodam V/Brawijaya; dan Kodam Jaya yang tidak lagi memakai nomer, sesuai posisinya sebagai garnisun ibukota Negara.

Berdasarkan penetapan reorganisasi tahun 1985 itu, maka dari 17 (baca: 16 Kodam), dibentuk 10 kodam. Kodam I/Bukit Barisan; Kodam II/ Sriwijaya; Kodam III/Siliwangi; Kodam IV/Diponegoro; Kodam V/Brawijaya; Kodam VI/Mulawarman; Kodam VII/ Wirabuana; Kodam VIII Trikora; Kodam IX/Udayana; dan Kodam Jaya.

Misteri Kodam XI

Sebelum reorganisasi 1985, kondisi keberadaan nomenklatur 17 kodam (baca: 16 Kodam) selama sekitar 10 tahun, sempat memunculkan teka-teki terkait penyebutan 17 kodam, karena kodam yang ada sesuai jumlah Pangdam masing-masing, ternyata hanya 16. Hal ini terjadi karena sekitar tahun 1973-1974, status **Kodam XI/Tambun Bungai** di Kalimantan Tengah telah diturunkan jadi Korem untuk dilebur jadi satu dengan Kodam X/Lambung Mangkurat.

Alhasil jumlah kodam saat direorganisasi pada tahun 1985 bukan lagi 17 kodam, tetapi hanya 16 kodam. Repotnya lagi nama Bungai dan Tambun, duet abang beradik pahlawan suku Dayak dari Kalimantan Tengah ini belum begitu dikenal di Indonesia, tidak sepopuler nama Mulawarman.

Likuidasi Kodam XI di Pulau Kalimantan jadi Korem di bawah Kodam X, tanpa diikuti penyesuaian nomenklatur nomer urut sederetan kodam berikutnya dari 12 hingga 17, otomatis menyisakan misteri tersendiri selama sepuluh tahun berikutnya. Yaitu tentang di mana sesungguhnya lokasi keberadaan Kodam XI akan diproyeksikan di pulau Kalimantan?

Lagi pula terkait misteri itu, institusi resmi TNI AD pun masih sering menyebut jumlah Kodam ada 17 Kodam. Contoh, tentang Pembentukan Kodam VII/Wirabuana, situs resmi Kodam Wirabuana menulis sebagai berikut: " Reorganisasi di lingkungan TNI-AD dilakukan pertengahan Dasawarsa 80-an. pada awal tahun 1985 diadakan reorganisasi di lingkungan kompartemen kewilayahan di mana Kodam yang semula berjumlah 17 disederhanakan menjadi 10 Kodam. " Silahkan lihat http://www.kodam-wirabuana.mil.id/index.php?module=content&id=42)

Misteri itu menjelma menjadi spekulasi dan analisis tersendiri

bagi terutama kalangan pengamat dari sejumlah negara tetangga yang mencermati gerak gerik militer Indonesia, pasca politik konfrontasi Komando Ganyang Malaysia.

Apalagi semasa tahun 1974an ketika Kodam XI/Tambun Bungai di Kalimantan Tengah dilikwidasi, justru di Asia Tenggara, tengah terjadi pergolakan bersenjata yang melibatkan langsung aksi militer dari TNI di Timor Timur. Itulah koloni terakhir di Asia Tenggara yang ditinggalkan begitu saja oleh Portugis, negara induk, kolonialisnya.

Misteri itu dicermati para analis militer sejumlah negara tetangga, khususnya Australia, Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam. Muncul praduga seolah TNI punya ambisi teritorial tertentu di Kalimantan, terutama terkait dengan implikasi dari Politik Konfrontasi Dwikora Ganyang Malaysia yang pernah dikampanyekan Presiden Sukarno selaku Pangti ABRI. Sehingga ada kesan seakan Kodam XI itu diproyeksikan untuk menamai kodam baru yang terdiri dari wilayah Kalimantan (termasuk Sabah dan Serawak, minus Brunai).

Spekulasi misteri Kodam XI itu kemudian dikaitkan pula dengan status Kodam XV/Udayana yang saat reorganisasi 1985 tetap dipertahankan dengan nomenklatur baru menjadi Kodam IX/Udayana yang membawahi Korem tersendiri di Timor Timur , dengan status khusus sebagai Kodahan (Komando Daerah Pertahanan).

Politik Teritorial TNI

Terlepas dari berbagai misteri, sesungguhnya TNI secara khusus memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan politik integratif keIndonesia-Rayaan. Kodam, bagi TNI AD, juga memiliki pengertian tersendiri sebagai Komando Utama (Kotama) Pembinaan dan Operasional Kewilayahan.

Kekuatan Kodam selaku Kotama itu terdiri dari beberapa tingkatan komando. Mulai dari tingkat Komando Resort Militer (*Korem*) di jenjang keresidenan atau gabungan dua-tiga kabupaten kota, hingga Bintara Pembina Desa (*Babinsa*) di tingkat desa atau kelurahan. Korem sendiri membawahi jenjang komando pasukan di tingkat kabupaten atau kota di bawahnya, yang popular dengan nama Komando Distrik Militer (*Kodim*). Lalu komando territorial berikut yang di bawah tanggung jawab Kodim, adalah Komando Rayon Militer (*Koramil*) di tingkat kecamatan. Koramil ini memiliki fungsi sangat strategis dalam Sishankamrata karena bertugas langsung menentukan ujung tombak dari perlawanan rakyat dengan cara seefektif mungkin melalui penyebaran para Bintara Pembina Desa (*Babinsa*) di tingkat desa atau kelurahan se-Indonesia.

Selain itu tiap Kodam pun didukung satuan-satuan tempur dan satuan bantuan tempur berupa Brigade, Batalyon, Detasemen atau Kompi. Contoh Brigade Infanteri (Brigif), Batalyon Artileri Medan (Yonarmed), Batalyon Kavaleri Serbu (Yonkav/Serbu), atau Batalyon Zeni Konstruksi (Yonzikon). Pembentukan satuan tempur di tingkat kodam ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi kewilayahan masing-masing.

Untuk itu Kodam mengemban pula tugas mendidik, membentuk, dan mengembangkan keprajuritan di

tingkat Tamtama dan Bintara yang dilaksanakan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) melalui Sekolah Calon Tamtama (Secatam), Sekolah Calon Bintara (Secaba). Termasuk pula Komando Pendidikan Latihan (Kodiklat) Tempur.

Tentang penentuan kewilayahan kodam yang dipimpin Panglima berpangkat Mayor Jendral bintang dua, apa cukup dalam satu atau dua lebih provinsi, tergantung faktor situasi, kondisi, letak geografis, tingkat kerawanan, dalam masyarakatnya. Kombinasi faktor itu yang membuat Mabes TNI, juga selalu bersikap dinamis dalam menanggapi perkembangan masing-masing wilayah.

Dinamika ini tercermin pada pemekaran balik sejumlah kodam dengan menghidupkan kembali beberapa kodam yang pernah ada. Contoh terakhir terkait dinamika sosial politik ini bisa ditilik dari diaktifkannya kembali Kodam Iskandar Muda mulai 5 Februari 2002 yang membawahi Korem 011/Lilawangsa dan Korem 012/Teuku Umar. Hal ini jelas terkait dengan upaya antisipasi atas realisasi alih status Daerah Istimewa Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai isi MoU (*Memorandum Of Understanding*) Helsinki.

Secara umum sejarah kelahiran dan pembentukan kodam terlihat sejalan dengan dinamika situasi politik dan keamanan dalam negeri selama beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang belum menunjukkan titik terang semasa itu. Di beberapa daerah terjadi pembrontakan dan aksi bersenjata yang mengarah pada separatisme yang banyak mengisi tahun-tahun pertama setelah proklamasi kemerdekaan hingga saat pengakuan kedaulatan tahun 1949, bahkan sampai saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan.

Kekacauan politik yang terjadi di dalam negeri ini sempat memancing Belanda untuk melancarkan agresi militer. Termasuk juga memicu pergolakan daerah dan pemberontakan bersenjata di beberapa wilayah tanah air. Contoh gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Begitu pula gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), maupun pembrontakan bersenjata Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semessta (PRRI/Permesta) di Sumatera Tengah dan Sulawesi Utara, dst..

Fenomena itu sigap ditanggapi pemerintah dan TNI dengan mengkonsolidasi dan mereorganisasi institusi militer. Pada tanggal 20 Juni 1950 dibentuk tujuh Territorium di seluruh Indonesia. Contoh, Territorium VII yang berkedudukan di Makassar di bawah Panglima Letkol Achmad Yunus Mokoginta; Instruksi pembentukan Teritorium itu tertuang dalam Surat Penetapan KSAD Nomor : 83/KSAD/Pnt/1950. Nama Teritorium itu lalu diubah lagi pada bulan Agustus 1950 menjadi Tentara dan Teritorium (TT).

Pembentukan Teritorium VII/Indonesia Timur yang membawahi wilayah Sulawesi dan Maluku ini, merupakan cikal bakal lahirnya Kodam VII/Wirabuana. Tanggal peristiwa itu juga dijadikan sebagai acuan tanggal lahir Kodam VII/Wirabuana, yakni 20 Juni.

Berdasarkan penetapan Menteri Pertahanan No.12/MP/1950 tertanggal 5 Januari 1950 itu maka ditentukanlah bahwa seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat, kemudian dibagi kembali ke dalam 11 Teritorium, termasuk Teritorium Sulawesi dan Maluku.

Berkenaan dengan situasi dinamika pergolakan daerah saat itu, maka TT VII/Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar di bawah komando Panglima Kolonel Inf. A.E. Kawilarang mendapat tugas utama untuk menghancurkan gerombolan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) pimpinan Dr. Soumokil di Maluku. Untuk itu Panglima TT-VII lalu membentuk Komando Pasukan (Kompas) Maluku Selatan dengan Komandan Operasi Panglima TT-VII sendiri, yang dalam melanjutkan penumpasan RMS kelak digantikan oleh Letkol Slamet Riyadi.

Enam bulan setelah Teritorium Sulawesi dan Maluku dibentuk, diadakan lagi reorganisasi di lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Kali ini reorganisasi itu dilakukan terkait dengan hasil persetujuan Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 19 Desember 1949 berupa pelikuidasian Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) untuk digabung dalam lingkungan APRIS. Sekitar 30.000 orang tentara Belanda bekas KNIL pun harus direkrut ke dalam tubuh APRIS. Adanya penambahan personel dan kondisi ancaman pada saat itu pula, otomatis mengakibatkan keberadaan organisasi APRIS harus ditinjau kembali.

Sementara itu perkembangan situasi keamanan di Indonesia Timur yang belum stabil pada akhir dekade 1950-an juga menuntut pembentukan kekuatan militer handal melalui institusi militer yang terorganisasi. Institusi yang mau tidak mau harus mampu mengoperasikan fungsi pertahanan yang kuat, pembinaan teritorial yang berjangkauan lebih luas, dan sanggup menghadapi berbagai bentuk ancaman di wilayahnya.

Kebutuhan ini muncul sebagai konsekwensi mencuatnya konsepsi strategi perang wilayah atau perang rakyat semesta yang dinilai jitu guna menghadapi kekuatan kaum separatis yang condong merusak kekuatan integritas nasional. Strategi pertahanan daerah dengan titik berat pulau besar dengan penguasaan unsur daratan juga mewarnai pandangan dan pemikiran strategi saat itu.

Penumpasan gerakan separatis RMS di Maluku itu menyita seluruh perhatian pemerintah, dalam hal ini Komando TT VII/Indonesia Timur yang kemudian disebut sebagai Komando Tentara dan Teritorium VII/Wirabuana. Padahal penyelenggaraan operasi militer di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara juga masih berada di bawah Komando TT VII/Wirabuana, dengan pelaksana tugas satuan Komando yang diberi nama Mobile Comando Operatie (MCO).

Trikora Pembebasan Irian

Dalam konflik dengan Belanda atas penyelesaian pengembalian Irian Barat, maka pemerintah RI membentuk Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) pada bulan Mei 1950 yang dikomandani oleh Kolonel A.E. Kawilarang berkedudukan di Makassar. Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) membawahi wilayah Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Sunda

kecil termasuk Maluku dan Irian Barat. Pada bulan September 1950 TNI direorganisasi, Komando Pasukan (Kopas) Maluku Selatan diganti menjadi Kopas D dikomandani oleh Letkol C.F. Warou dengan wilayah meliputi Maluku Irian Barat.

Berdasarkan Penetapan Panglima TT-VII Nomor : 8004/VII/1950 tanggal 5 Juli 1952 Kopas D dilikuidasi, kemudian dibentuk Resimen Infanteri-25 (RI-25) dengan Komandan Letkol Suprapto Sukowati, yang diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1952 dengan wilayah Maluku dan Irian Barat. Untuk pertama kali kedua wilayah itu berada di bawah satu Komando.

Maka di bawah komando RI-25, penyusupan ke daratan Irian Barat pun mulai dilakukan sebagai langkah awal yang bersifat militer untuk mengembalikan wilayah itu ke pangkuan ibu pertiwi. Pada bulan Mei 1957 Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) kembali direorganisasi. Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) dilikuidasi, dengan membagi wilayahnya menjadi empat Komando Daerah Militer. Di antaranya adalah Komando Daerah Militer Maluku Irian Barat atau disingkat (KDM-MIB) sebagai pengganti fungsi komando Resimen Infanteri-25 (RI-25).

Perjuangan pengembalian Irian Barat semakin menggelora setelah Presiden RI mengumandangkan Tiga Komando Rakyat yang disingkat Trikora di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang mendapat respon dan didukung dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Irian Barat. Untuk mewujudkan Komando Presiden RI, pada bulan Februari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan Panglima Mayjen TNI Soeharto. Rencana Operasi Pembebasan Irian Barat disusun, satuan-satuan APRI dan sukarelawan digelar, sementara diplomasi berjalan terus.

Pada tanggal 8 Agustus 1962, Panglima Angkatan Darat membentuk Kodam XVII Irian barat dengan Surat Keputusan Pangad Nomor : KPTS 1052/ 8/1962 dengan nama lengkapnya Komando Daerah Militer Irian Barat. Selanjutnya tanggal 15 agustus 1962 berlangsung perundingan secara bilateral pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda di New york yang menghasilkan penandatanganan Persetujuan Indonesia – Nederland mengenai :

1. Gencatan senjata dilakukan di Irian Barat.
2. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia melalui PBB.

Sebagai tindak lanjut persetujuan New York tersebut, maka PBB membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat, yaitu UNTEA (*United Nation Temporary Executive Authority*).

Untuk menyiapkan pengalihan tanggung jawab keamanan dari UNTEA, Pemerintahan Republik Indonesia membentuk satuan tugas yang disebut Kontingen Indonesia Irian Barat (KOTINDO) yang secara taktis dibawah UNTEA yang kemudian menjadi inti Kodam XVII/Irian Barat.

Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia, sehingga selanjutnya sejak tanggal 17 Mei 1963 pun nama Kodam XVII/Irian barat resmi dirubah menjadi Kodam XVII/Cenderawasih dengan tugas

melaksanakan fungsi baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial masyarakat.

Selanjutnya 20 tahun kemudian terkait dengan kepesatan laju hasil pembangunan nasional, dan mengantisipasi kemungkinan ada ancaman, maka pemerintah Republik Indonesia pun memandang perlu mengadakan reorganisasi ABRI lagi. Dalam jajaran TNI AD reorganisasi dilaksanakan sesuai perintah operasi Kasad Nomor: 01 tanggal 27 September 1984. Beberapa Kotama dilikuidasi, kemudian dibentuk Kotama baru.

Untuk itu maka Kodam XV/Pattimura dan Kodam XVII/Cenderawasih pun dilikuidasi menjadi satu kodam kembali, yaitu Kodam VIII/Trikora yang diresmikan pada tanggal 8 Mei 1985. Sejak itu pun Maluku dan Irian Jaya berada di satu Komando wilayah lagi, setelah yang pertama pada tanggal 1 Agustus 1952. Atas fakta sejarah ini, maka pada tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kodam VIII/Trikora sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/691/VI/1986.

Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/11/V/199 tanggal 7 Mei 1999 tentang perubahan nomor registrasi wilayah Kodam XVII/Trikora menjadi Kodam XVII/Trikora terhitung mulai tanggal 12 Mei 1999, maka Kodam XVII/Trikora hanya meliputi wilayah Irian Jaya yang membawahi Korem 171/PVT, Korem 172/PWY, Korem 173/PVB, Korem 174/ATW dan meliputi 12 wilayah Kodim.

Namun dalam perjalanan sejarah berikutnya, sesuai dengan dinamika perkembangan sosial politik domestik maupun regional, maka berdasarkan Surat Keputusan Kasad nomor Skep/175/IX/2007 tanggal 26 September 2007, terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 nomor Registrasi Kodam XVII/Trikora berubah menjadi Kodam XVII/Cenderawasih yang meliputi wilayah Papua dan Papua Barat serta membawahai 4 Korem dan 12 Kodim.

Pada tanggal 17 Mei 2008 Kodam XVII/Cenderawasih genap berusia 45 tahun. Meski beragam hambatan menantang di medan tugas yang berat, Prajurit Kodam XVII/Cenderawasih maju melangkah bersama rakyat mencapai kejayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan stabilitas pertahanan yang mantap untuk menunjang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembentukan Kodam VII/Wirabuana.

Berkaitan dengan pembentukan Kodam VIII/Trikora, maka sebelum itu dibentuk pula Kodam VII/Wirabuana yang khusus mencakup seluruh wilayah Pulau Sulawesi. Gugus pulau Sulawesi ini memerlukan pendekatan tersendiri, apalagi wilayah ini juga merupakan pintu masuk utama ke Kawasan Timur Indonesia, sehingga membutuhkan suatu institusi pertahanan matra darat yang kokoh dan terkendali yang mampu berperan sebagai pengendali stabilitas keamanan di wilayah.

Berdasarkan pertimbangan itu pula, maka KSAD Jenderal TNI Rudini pada 12 Februari 1985 segera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/131/11/1985 tentang liquidasi Kodam XIII/ Merdeka dan Kodam XIV/ Hasanuddin menjadi Kodam VII/Wirabuana.

Tindak lanjut pelaksanaan dari Surat Keputusan KSAD itu, maka Kodam VIII/ Merdeka di Manado resmi diliquidasi pada 1 Mei 1985, kemudian menyusul Kodam XIV/ Hasanuddin di Ujungpandang dilikuidasi pada 3 Mei 1985. setelah kedua Kodam tersebut dilikuidasi, maka di wilayah Sulawesi hanya ada satu Kodam.

Kodam VII/Wirabuana dengan Panglima pertama Kodam VII/ Wirabuana adalah Brigjen TNI Nana Narundana ini merupakan kompartemen territorial strategis yang luas wilayah tanggung jawabnya mencakup 6 provinsi di seluruh Pualu Sulawesi yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dengan wilayah terbentang luas serta penduduk yang sangat plural, mau tidak mau Kodam VII/Wirabuana dituntut selalu menjaga kredibilitasnya sesuai dengan sesanti Kodam VII Wirabuana terhadap NKRI "Setia Hingga Akhir Dalam Keyakinan".

Meski Kodam VII/Wirabuana berdiri pada 12 Februari 1985, Kodam ini menetapkan tanggal 20 Juni 1950 sebagai hari jadinya. Penetapan hari jadi tersebut didasarkan atas hari pembentukan Komando Tentara dan Teritorium VII/Indonesia Timur, pada tanggal 20 Juni 1950. Komando TT VII/ Indonesia Timur itu pada saat itu resmi dinamai sebagai Kodam VII/Wirabuana, sebelum kemudian dimekarkan jadi lima kodam di kawasan Timur Indonesia, yaitu dua kodam di Sulawesi, satu kodam di gugus kepulauan Sunda Kecil, satu kodam di gugus kepulauan Maluku, dan satu lagi kodam di Irian Barat.

Sebelum itu Kodam XIII/ Merdeka sejak berdiri pada tahun 1957 hingga dilikuidasi pada 1 Mei 1985, telah dipimpin 13 Panglima. Panglima pertama Kodam XIII/Merdeka ini adalah Letkol Inf. Moersjid yang menjabat hingga tahun 1959. Dan terakhir adalah Brigjen TNI Raja Inal Siregar yang menjabat Pangdam pada tahun 1984 hingga 1985.

Komando Teritorial Sumatera

Sebagaimana di kawasan Timur Indonesia, dinamika perkembangan komando territorial di Pulau Sumatera juga sangat dinamis. Meski tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang paling bersejarah dalam perjalanan Bangsa Indonesia, namun akibat keterbatasan alat komunikasi, maka berita Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno dan Mohamad Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat itu tidak serta merta sampai ke daerah-daerah. Pada waktu itu Rakyat di Sumatera Timur kala itu, baru mengetahui Indonesia Merdeka pada tanggal 30 September 1945.

Meski demikian para pemuda patriot kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera tak kalah sigap dengan saudara saudaranya di Jawa. Mereka pun bergegas membentuk berbagai organisasi massa. Seperti di Aceh berdirilah Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), di Medan Barisan Pemuda Indonesia (BPI), di Sumatera Barat, Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan di Riau Pemuda Indonesia (PI). Dari banyak ormas yang terbentuk itu dan dalam upaya menghimpun kekuatan bersenjata maka pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuklah BKR yang dipimpin Achmad Tahir. yang kemudian menjelma jadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Lalu tanggal 12 Oktober 1945 berdiri TKR Divisi V di Aceh, tanggal 10 Oktober 1945 TKR Divisi IV di Sumatera Timur, tanggal 10 November 1945 Divisi VI di Tapanuli. Terbentuknya divisi-divisi tersebut terkait erat dengan peristiwa bentrokan bersenjata di Jl. Bali pada tanggal 13 Oktober 1945, dan peristiwa di Siantar Hotel pada tanggal 15 Oktober 1945, dan peristiwa di Matahari Hotel Berastagi pada tanggal 23 Nopember 1945. Semua peristiwa itu menjadi saksi dan bukti sejarah tentang semangat patriotisme dan pantang menyerah yang ditunjukkan pejuang-pejuang di Sumatera ini. Semua rangkaian pertempuran ini kemudian dikenal dengan nama "Palagan Medan Area."

Bersamaan dengan itu ada tanggal 1 Januari 1946 di Sumatera Tengah yaitu Sumbar dan Riau, telah terbentuk pula TKR Divisi III.

Selanjutnya menjelang perundingan KMB di Den Haag dilakukanlah persiapan di bidang militer untuk menerima penyerahan tanggung jawab keamanan dari Belanda kepada pihak Indonesia., Berkenaan dengan persiapan itu, maka seluruh jajaran TNI-AD di Indonesia dibagi dan ditetapkan dalam 7 Territorium. Karena itulah dengan mengingat keberadaan divisi-divisi TKR di Sumatera bagian Utara dan Sumatera Tengah, maka pada tanggal 13 Desember 1949 dibentuklah Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara (KO TT-SU), yang meliputi seluruh wilayah Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur, dengan sekaligus menetapkan Letkol A.E Kawilarang sebagai Komandan Komando Territorium/Sumatera Utara (Ko. TT/SU).

Terkait dengan itu, dalam perkembangan berikutnya pun terjadi perubahan sebutan Brigade jadi Resimen.. Berdasarkan Penetapan Kasad No: 83/Kasad/Pnt/1950 tanggal 20 Juni 1950 maka KO TT-SU pun dijadikan Komando Tentara Teritorium-I Sumatera Utara (KO TT-I/SU) dengan wilayah meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Bersamaan dengan itu pada 20 Juni 1950 diresmikan pula lambang Bukit Barisan sebagai Lambang Komando Territorium I/ Sumatera Utara dengan nama Komando Tentara Territorium I/ Sumatera Utara. Tanggal 20 Juni ini kemudian ditetapkan juga sebagai Hari Jadi Kodam I/ Bukit Barisan yang dikuatkan dengan ST Kasad No:ST/636/V/1986 tanggal 20 Mei 1986. Berdasarkan Penetapan Panglima KO TT-I/SU Nomor: 247/V/ ORG/1951, selanjutnya tanggal 21 Juni 1951 KO TT-I/SU berubah menjadi KO TT-I/Bukit Barisan (KO TT-I/BB) dengah wilayah komando yang sama dengan KO TT-I/SU.

Setelah Ko.TT/SU berhasil mengkonsolidasi kekuatan dan struktur organisasi maka Ko.TT I/BB pun siap mengatasi segala gangguan keamanan nasional yakni menumpas pemberontakan DI/TII di Aceh, dan terutama pemberontakan yang dilakukan PRRI di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Di wilayah Sumatera Utara melalui operasi "Sapta Marga" dipimpin Mayor Palawi, Mayor Syafei dan Mayor Raja Syahnan. Lalu di wilayah Sumatera Barat melalui operasi "17 Agustus " yang dipimpin oleh Kolonel A.Yani, dan di wilayah Riau melalui operasi " Tegas" dipimpin Letkol Kaharudin Nasution.

Karena itulah pada tanggal 27 Desember 1956 Resimen I di Aceh dipisah dari Ko.TT I/BB menjadi Komando Daerah Militer Aceh (KDMA), dan Resimen IV jadi KDM Sumatera Tengah, Sementara itu Resimen II dan Resimen III tetap berada di Ko. TT I/BB. Setelah keadaan pulih dari pemberontakan PRRI/PERMESTA, maka tanggal 15 April 1959 Komando Daerah Militer Aceh ditetapkan menjadi Kodam I/Iskandar Muda, dan Komando Militer Sumatera Tengah menjadi Kodam III/17 Agustus, sementara Komando TT I/BB menjadi Kodam II/Bukit Barisan.

Pembentukan Kodam III/17 Agustus di Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat dan Riau berkenaan dengan penumpasan pembrontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) itu juga terkait erat dengan pembentukan Kodam XIII/Merdeka di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah kaitan tugas pemulihan keamanan akibat penumpasan pembrontakan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta).

Namun 25 tahun kemudian berdasarkan Perintah Operasi Kasad No:011/1984 tanggal 22 September 1984 tentang Reorganisasi TNI-AD yang disempurnakan dengan Surat Telegram Kasad No:STR/430/1984 tanggal 21 Oktober 1984 dan STR/603/1984 tanggal 28 Desember 1984, maka sejalan dengan penciutan jumlah kodam yang ada menjadi 10 Kodam, maka Kodam I/ Iskandar Muda, Kodam II/Bukit Barisan dan Kodam III/17 Agustus pun dilikuidasi. Ketiga kodam tersebut kemudian dilebur kembali menjadi satu komando territorial dengan nama Kodam I/Bukit Barisan yang berwilayah meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Kodam I/Bukit Barisan kemudian membawahi 7 Korem, yang terdiri dari Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe, Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh, Korem 022/Pantai Timur di Pematang Siantar, Korem 023/Kawal Samudra di Sibolga, Korem 031/Wira Bima di Pekanbaru, Korem 032/Wira Braja di Padang, Korem 033/Wira Pratama di Tanjungpinang.

Namun sejalan dengan tercapainya perdamaian antara pihak separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI yang dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MOU) di Helsink, maka Korem 011/ Lilawangsa dan Korem 012/Teuku Umar atas kebijakan pemerintah pusat terhitung sejak tanggal 5 Februari 2002 dipisahkan kembali dari Kodam I/Bukit Barisan dan dimekarkan menjadi Kodam Iskandar Muda guna mengantisipasi pembentukan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Politik Integrasi Penamaan Kodam

Dari dinamika pembentukan, pemekaran, likuidasi dan peleburan, maupun pengaktifan kembali sejumlah komando territorial TNI AD itu, tercermin pula kesigapan strategis pemerintah dan TNI dalam mengantisipasi setiap gejolak ancaman disintegrasi nasional di semua wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Kesigapan itu terlihat jelas hingga saat terbentuknya ke-17 komando territorial TNI AD di seluruh wilayah NKRI.

Sesungguhnya pun, jika ditilik dari nama-nama kodam yang diberikan bagi suatu komando territorial terbersit pula sikap dan semangat kesatuan persatuan

serta patriotism dari TNI AD dalam membina wilayah komando masing-masing territorial. Hal ini tercermin pada nama-nama yang ditetapkan TNI atas setiap kodam, yang niscaya didasari pertimbangan filosofis historis dan geografis dari setiap wilayah komando territorial dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai bangsa Negara merdeka yang bersatu dan berdaulat.

Keberadaan ke-17 Kodam yang pernah ada dengan nomenklatur nama dan logo masing-masing, tidak bisa tidak tentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan matang atas sejumlah aspek kejuangan. Dari ke-17 nama kodam itu, 15 kodam jelas menyandang nama yang bersifat unik dan mencerminkan kekhasan dari wilayah komando territorial masing-masing. Umumnya nama-nama dari ke-15 kodam itu adalah gambaran khas tentang ciri geografis flora fauna maupun historikal tokoh atau kerajaan besar masing-masing.

Contoh nomenklatur nama (2) Bukit Barisan untuk Kodam II di Sumut ini jelas diambil dari nama pegunungan di wilayah Sumatera yang menggambarkan tentang keunikan topografi dan nilai strategis geografis dari wilayah Sumatera bagian utara maupun tengah. Begitu pula nama (17) Cenderawasih yang merupakan nama burung dewata yang hanya ada di Irian, jelas mewakili keunikan identitas dari Papua yang kaya dengan keanekaragaman Nusantara, untuk disandang sebagai nama Kodam XVII di Irian Barat atau Papua.

Demikian juga dengan nomenklatur nama (1) Iskandar Muda untuk Kodam I di Aceh; (5) Jayakarta untuk Kodam V di Jakarta Raya; (6) Siliwangi untuk Kodam VI di Jawa Barat; (7) Diponegoro untuk Kodam VII di Jawa Tengah dan DI Jogyakarta; (8) Brawijaya untuk Kodam VIII untuk di Jawa Timur; (10) Lambung Mangkurat untuk nama Kodam X di Kalimantan Selatan; (11) Tambun (dan) Bungai untuk Kodam XI di Kalimantan Tengah; (12) Mulawarman untuk Kodam XII di Kalimantan Timur; (14) Hasanudin untuk Kodam XIV di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara; (15) Udayana untuk Kodam XV di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, (16) Pattimura untuk Kodam XVI di Maluku. Semua nomenklatur itu adalah nama-nama tokoh pejuang besar di wilayah komando territorial masing-masing yang mewakili sikap dan semangat juang cinta tanah airnya. Nomenklatur nama-nama itu tentu saja diharapkan mampu menginspirasi jiwa masing-masing prajurit di kodam tersebut.

Lalu nomenklatur nama (4) Sriwijaya untuk Kodam IV di Sumatera bagian Selatan; dan (9)Tanjung Pura untuk nama Kodam IX di Kalimantan Barat, tentu menggambarkan tentang kejayaan suatu kerajaan besar yang pernah ada di wilayah komando territorial masing-masing.

Namun berbeda dari nomenklatur ke 15 kodam di atas, ternyata ada dua kodam yang tidak diberikan nama sesuai kekhasan dan keunikan yang menjadi ciri tradisional dari wilayah komando territorial masing-masing. Yaitu Kodam III di Sumatera Barat dan Riau, serta Kodam XIII di Sulawesi Utara. Kedua kodam itu masing-masing Kodam III diberi nama (3) 17 Agustus XIII/dan untuk Kodam XIII diberi nama (13) Merdeka. Anomali penamaan kedua kodam itu tentu memiliki latar

belakang pertimbangan filosofis yang tersendiri.

Keganjilan penamaan kedua kodam itu juga pernah disinggung dalam catatan kaki di sebuah makalah berjudul Risalah Blunder Politik Soeharto dan Disintegrasi Nasional untuk mata kuliah geografi yang diasuh Brigjen Prof Dr Ir I Made Sandy pada program studi Ketahanan Nasional Pasca sarjana Universitas Indonesia, tahun 1998. Risalah yang ditulis Dhia Prekasha Yoedha itu menyebutkan bahwa penamaan kedua kodam tersebut jelas terkait langsung dengan pembrontakan PRRI/Permesta. Dalam arti nama yang diberikan dan ditetapkan berdasarkan nama operasi penumpasan kedua pembrontakan tersebut, yaitu Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani di Sumatera Barat dan Operasi Merdeka di Sulawesi Utara tentu mengandung maksud dan tujuan tertentu. Yaitu untuk mengingatkan semua pihak, terutama kalangan militer Indonesia, agar jangan lagi coba-cona membrontak dari hakekat proklamasi kemerdekaan Negara kestuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Peringatan ini boleh jadi ditanamkan melalui penamaan komando territorial setempat di wilayah tersebut, menimbang bahwa kedua pembrontakan itu jelas merupakan gerakan subversive yang terbukti disponsori oleh kekuatan Negara asing lain.

Berdasarkan tilikan atas nomenklatur penamaan komando wilayah territorial ini, jelas tersirat memang ada semacam politik integrasi yang ditempuh oleh pemerintah, khususnya TNI-AD dalam menjaga dan memperkokoh kesatuan persatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Daftar Nama dan Logo 13 Kodam di Indonesia sekarang ini:

NAMA KODAM	LOGO	MARKAS KOMANDO	WILAYAH
Kodam Iskandar Muda		Banda Aceh	Seluruh Provinsi NAD
Kodam I Bukit Barisan		Medan	3 Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau
Kodam II Sriwijaya		Palembang	5 Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung

Kodam Jaya		Jakarta	DKI Jakarta, plus Kota Bekasi dan Kota Tangerang
Kodam III Siliwangi		Bandung	2 Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten minus 2 Kota
Kodam IV Diponegoro		Semarang	2 Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Kodam V Brawijaya		Surabaya	1 Provinsi Jawa Timur
Kodam VI Mulawarman		Balikpapan	2 Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Kodam VII Wirabuana		Makassar	6 Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Kodam IX Udayana		Denpasar	3 Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
Kodam XII Tanjungpura		Pontianak	2 Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

Kodam XVI Pattimura		Ambon	2 Provinsi Maluku dan Maluku Utara
Kodam XVII Cenderawasih		Jayapura	2. Provinsi Papua dan Papua Barat

Kodam XIII Merdeka

Kodam XII Tanjungpura (Logo Lama)

Kodam VII/Wirabuana (Dialihkan dari Kodam XIV/Hasanuddin)

Wikipedia bahasa Indonesia http://www.kodam-wirabuana.mil.id/index.php?module=content&id=42

Kodam XVII/Cenderawasih (Dialihkan dari Kodam Trikora)

Wikipedia bahasa Indonesia

Logo yang belum berhasil ditemukan:

- Kodam III/17 Agustus;
- Kodam XI/Tambun Bungai;
- Kodam XIV/Hasanuddin;
- Kodam Trikora;

Daftar Bacaan dan Rujukan:

- **Dinas Sejarah Militer TNI-AD,** ***Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat*****,** Fa. Mahjuma, Bandung, 1972.
- Dhia Prekasha Yoedha: ***Blunder Politik Soeharto dan Disintegrasi Nasional***, Risalah untuk mata kuliah Geografi dan Ketahanan Nasional yang diasuh Brigjen Prof Dr Ir I Made Sandy, Program Studi Ketahanan Nasional Pasca sarjana Universitas Indonesia, tahun 1998.

- logo kodam, logo militer
- http://www.kodam-wirabuana.mil.id/index.php?module=content&id=42
- **Sejarah Kodam I/BB** Situs web resmi Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan
- http://kodam1-bukitbarisan.mil.id/2014/06/12/sejarah-kodam-ibb/
- **http://klikmunadi.blogspot.com/2012/10/daftar-nama-kodam-di-indonesia.html**
- Situs web resmi Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
- Kodam Iskandar Muda
- Kodam I/Bukit Barisan
- Kodam II/Sriwijaya
- Kodam Jaya
- Kodam III/Siliwangi
- Kodam IV/Diponegoro
- Kodam V/Brawijaya
- Kodam VI/Mulawarman
- Kodam VII/Wirabuana
- Kodam IX/Udayana
- Kodam XII/Tanjungpura
- Kodam XVI/Pattimura
- Kodam XVII/Cendrawasih
- Kodam XIV/Hasanuddin Wikipedia bahasa Indonesia, http://www.kodam-wirabuana.mil.id/index.php?module=content&id=42

id.wikipedia.org

Memperkuat Segitiga Pertahanan Indonesia

Budi Afandi
Penulis

Pertahanan Indonesia dalam Ringkasan

Tahun 1945 bisa dijadikan titik mula jika membicarakan jalan panjang Pertahanan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Tahun tersebut telah memberikan pijakan bagi kelahiran konsep pertahanan dan keamanan Indonesia yang tangguh.

Mempertahankan kemerdekaan adalah hal pertama yang dihadapi bangsa Indonesia yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada masa-masa awal tersebut, kekuatan Sekutu yang telah membuat "babak belur" tentara Jepang, rupanya berkehendak untuk mengembalikan kekuasaannya di atas bumi pertiwi.

Berdasarkan *Civil Affairs Agreement* Tentara Pendudukan Sekutu (Satuan Tentara Inggris) yang tergabung dalam Komando SEAC bertugas melucuti tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (RAPWI). Mereka tiba di Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya dan terus bergerak ke Bogor, Bandung, Ambarawa dan Magelang. Sementara tentara Australia mendarat di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah pada pihak sekutu sementara Pulau Morotai telah diduduki oleh satuan

tentara Amerika Serikat. Rupanya gerakan tentara Sekutu tersebut berusaha menyusupkan *The Netherland Indies Civil Administration (NICA)* yang kemudian memicu perlawanan bangsa Indonesia.

Pertempuran dimulai dari Surabaya pada 30 Oktober 1945 dan memicu pertempuran besar lain di Surabaya yang kemudian kita kenal dikenal dengan peristiwa 10 November yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan.

Pertempuran terus terjadi antara Bangsa Indonesia dengan kekuatan Sekutu yang bersikukuh untuk mengembalikan kekuasaannya. Belanda merasa cukup punya kekuatan militer untuk tetap memaksa Bangsa Indonesia yang baru saja merasakan bara kemerdekaan untuk kembali tunduk pada kekuasaan Belanda.

Tapi bara kemerdekaan itu ternyata memicu api perlawanan yang sengit, hingga memaksa Belanda untuk mau duduk dalam perundingan yang digelar di Linggarjati pada 12 November 1946.

Mengkompromikan hasrat berkuasa dan kehendak untuk merdeka adalah sebuah kemuskilan, terang saja kemudian perjanjian tersebut gagal. Belanda terus melancarkan operasi yang mendesak tentara Indonesia untuk melakukan strategi perang gerilya, sebuah strategi yang berhasil melahirkan kerjasama tentara Indonesia dengan rakyat sipil yang memiliki tekad serupa untuk mempertahankan kemerdekaan.

Strategi perang gerilya membuat pasukan Indonesia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang terbilang seimbang. Melimpahnya sumber daya manusia yang turut andil dalam pertempuran menjadi kekuatan sendiri yang memicu semakin kuatnya barisan pasukan Indonesia. Akibatnya, posisi Indonesia menjadi semakin kuat sementara tentara Belanda semakin terdesak.

Sebab situasi yang sudah tidak menguntungkan dan desakan dunia internasional, maka perundingan lainnya kembali digelar antara Belanda dan Pemerintah Indonesia di atas kapal perang Amerika Serikat bernama Renville di Teluk Jakarta.

Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan agar pemerintah Indonesia mengosongkan atau menarik pasukan bersenjata yang bergerilya dan unsur atau aparat pemerintahan darurat Indonesia di daerah pendudukan Belanda. Hal itu tentu saja berimbas pada kembali mampunya Belanda mengkoordinasikan kekuasaan dan kekuatannya diseluruh daerah yang diduduki, sementara Indonesia makin terpojok dengan luas wilayah yang juga semakin sedikit.

Ditengah deraan situasi yang memburuk, kondisi dalam negeri juga semakin memburuk dengan munculnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI-Muso) di Madiun pada September 1948. Beruntung semangat juang menghadapi gangguan kedaulatan dari luar dan dalam masih membara hingga pemberontakkan PKI-Muso dapat dihancurkan.

Pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan aksi militer setelah menambah jumlah kekuatan militer dengan mendatangkan sekitar 100.000 orang tentara. Aksi yang dikenal dengan "Polisional II" itu membuat pasukan Indonesia kembali menggelar strategi perang gerilya

yang memungkinkan perlawanan terus terjadi dipelbagai belahan bumi pertiwi.

Pada fase inilah Belanda mengalami "kehilangan muka" ketika pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam. Tidak hanya itu, serangan terhadap Surakarta antara 7-10 Agustus 1949, empat hari menjelang dihentikannya tembak-menembak oleh pihak Belanda dan Indonesia yang menghasilkan didudukinya sebagian dari kota Surakarta oleh pasukan Indonesia.

Kekalahan tersebut kemudian mendorong Belanda mengakui kedaulatan dan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia diseluruh bekas wilayah jajahannya di Nusantara. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda tersebut secara rasmi dikukuhkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda.

Diakuinya Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dan dunia Internasional tidak menjadi titik akhir perjuangan gerakan pertahanan Indonesia, sebab setelah itu, masih berlanjut adanya upaya-upaya dari dalam negeri untuk merongrong keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

Setidaknya kita bisa mencatat ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil pada 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat, yang dipimpinan Kapten Raymond Westerling. Kemudian pemberontakan Andi Azis pada 5 April 1950 di Makasar, Ujung Pandang. Selanjutnya ada Gerakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin MR. Dr. Robert Steven Soumokil yang ingin mendirikan Negara Republik Maluku Selatan dan memisahkan diri dari Indonesia.

Adapula Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang dideklarasikan oleh Letnan Kolonel Achmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan pada 15 Februari 1958 di Sumatera Barat. Dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual yang semula menjabat KSAD PRRI/Permesta.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia sejatinya tidaklah lahir bersamaan dengan kelahiran Negara Indonesia. Pada masa awal berdirinya, Negara Indonesia belumlah memiliki sebuah kesatuan tentara atau pasukan. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada 23 Agustus 1945, bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.

BKR di pusat dan daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah, tidak berada di bawah perintah Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. BKR tidak pula berada di jalur koordinasi Menteri Pertahanan.

Kemudian melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, yang kemudian diperingati sebagai hari kelahiran TNI, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dan pada 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Baru pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata yang ada menjadikannya

sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan secara resmi dilakukan pada 3 Juni 1947.

Pada 1950-1960-an TNI berjuang mempertahankan persatuan negara yang sedang digoyang oleh pemberontakan dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Kemudian dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan 1962-1965 TNI terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Pada masa Orde Baru (Orba), militer Indonesia disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang merupakan lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Awalnya unsur angkatan perang disebut ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Pada masa ini TNI ikut serta dalam dunia politik yang merupakan penerapan dari konsep Dwifungsi ABRI.

Memasuki reformasi, Dwifungsi ABRI adalah salah satu hal yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat untuk segera dihilangkan. Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan (*Security Sector Reform-SSR*) terus digiatkan dan menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Pada 1 April 1999, dibuat sebuah keputusan yang membawa angin segar bagi reformasi sektor pertahanan Indonesia yakni memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden presiden.

Kebijakan lain yang cukup menggembirakan adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Sedangkan unsur keamanan merupakan tugas Polri. Di mana semuanya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam).

Segitiga Pertahanan Indonesia

Secara umum, pertahanan negara atau nasional dapat diartikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Seiring dengan perkembangan dunia, sebuah sistem pertahanan tidak lagi hanya dipahami sebagai langkah-langkah militer yang efektif dan efisien, namun juga sebuah langkah yang mampu menempatkan paradigma yang lebih humanis dalam mendudukan manusia itu sendiri, bahwa manusia tidak *an sich* hanya merupakan objek dari persenjataan dan kekerasan fisik yang mungkin diambil sebagai langkah pertahanan negara.

Untuk menemukan sebuah sistem pertahanan yang efektif maka perlu kerjasama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif. Melalui kedua lembaga

tersebut diharapkan lahir sebuah kebijakan besar yang dapat menjadi pondasi digerakkannya sistem pertahanan yang mengedepankan prinsip demokrasi.

Bagaimanapun, inovasi dalam strategi pertahanan harus terus mampu beradaptasi dengan berbagai hal yang melingkupi sebuah negara, termasuk Indonesia. Ada berbagai persoalan geopolitik, hubungan antar negara, konflik internal maupun eksternal, dan hal lain yang menjadi ancaman bagi eksistensi negara seperti kejahatan transnasional, hingga aksi terorisme.

Seiring terus dilakukannya reformasi sektor pertahanan, tantangan pertahanan Indonesia juga terus mengalami kebaruan. Invasi militer negara lain, pemberontakan serta gerakan sparatis adalah tantangan nyata di masa lalu. Mungkin kini, gerakan sejenis dan senafas dengan itu yang secara nyata dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia masih terus ada, meski sudah terang semuanya akan bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan zaman.

Menghadapi semua hal itu, setidaknya ada tiga titik penting yang hendaknya terus mendapat perhatian terkait dengan pertahanan nasional Indonesia, ketiga titik yang bisa kita anggap sebagai Segitiga Pertahanan Indonesia, yakni:

a. Militer sebagai Kekuatan Pertahanan yang Utama

Meski invasi militer tidak sedang menjadi ancaman nyata dan langsung bagi bangsa Indonesia hari ini, kekuatan militer adalah salah satu kemutlakan bagi pembangunan pertahanan.

Faktanya, luas Indonesia yang demikian besar membutuhkan kekuatan militer yang tidak kecil agar semua titik dapat terpantau dengan baik. Militer sebagai satu pilar pertahanan sudah seharusnya dikonstruk sesuai dengan proporsional sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi kedaulatan kawasan Nusantara.

Kekuatan TNI di Darat, Laut dan Udara harus dikembangkan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan pertahanan. Pengembangan pertahanan oleh TNI tentu saja harus selalu berada pada dua bidang yang utama yakni pengembangan kemampuan personil (SDM) dan pengembangan kekuatan persenjataan.

Banyaknya kawasan perairan Indonesia memanglah menghendaki keberadaan armada laut dan udara yang tangguh, namun tentunya benteng kekuatan di daratan pun menempati posisi yang tidak kalah pentingnya. Pembaruan persenjataan dan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di internal TNI menjadi keniscayaan untuk mengembalikan "pamor" militer kita seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Kita tercatat pernah memiliki sejumlah sarana tempur yang terbilang tangguh untuk ukuran pada masa 1960-an, ketika Soekarno berkuasa. Saat itu perkembangan kekuatan militer Indonesia mendapat dukungan besar-besaran oleh teknologi militer terbaru dari Uni Sovyet.

Jika diuraikan, peta kekuatan militer Indonesia saat itu antara lain :

Armada Laut

1. Kapal Perang Utama, salah satunya

adalah yang terbesar dan tercepat di dunia buatan Sovyet dari kelas Sverdlov, dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inchi. Di Indonesia kapal ini mendapat nama KRI Irian, memiliki bobot 16.640 ton dengan awak sebesar 1270 orang termasuk 60 perwira.

2. Kapal Selam, Indonesia mempunyai 12 kapal selam kelas Whiskey dari Uni Sovyet yang hampir seluruhnya di persenjatai Torpedo jenis SEAT-50. Torpedo *fire* and *forget* ini merupakan torpedo terbaik pada zamannya. Kapal-kapal selam tersebut adalah KRI Cakra-401, KRI Nanggala-402, KRI Nagabanda-403, KRI Trisula-404, KRI Nagarangsang-405, KRI Tjandrasa-406, KRI Tjundamani-408, KRI Alugoro-407, KRI Widjajadanu-409, KRI Pasopati-410, KRI Hendradjala-411, KRI Bramasta-412.
3. Corvette, puluhan kapal tempur kelas Corvette juga diberikan kepada pemerintah Indonesia dimasa itu. Fungsi Corvette pada masa itu ialah sebagai penjaga atau pengiring dari kapal perang terbesar milik Indonesia KRI Irian. KRI Tjiptadi-881 yang merupakan salah satu dari Corvette bantuan Uni Sovyet. Indonesia mempunyai 104 unit kapal tempur.

Armada Udara

Angkatan udara Indonesia juga memiliki pesawat-pesawat canggih pada masa itu, seperti 20 Unit pesawat pemburu supersonic MiG-21 Fishbed yang merupakan pesawat tempur sergap berjarak pendek. 30 Unit pesawat MiG-15, 49 Unit pesawat tempur high-subsonic MiG-17, 10 Unit pesawat supersonic MiG-19 yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik. Pesawat supersonic MiG-21 yang mampu terbang dengan kecepatan mencapai Mach 2. 25 unit Pesawat Pembom Tu-16 Tupolev, 9 Unit Helikopter MI-6 yang merupakan buatan Rusia yang diproduksi oleh biro Mil yang dipimpin oleh Mikhail L. Mil. 16 Unit Helikopter Mi-4 yang bertugas pada wilayah sipil dan militer, kemudian Pesawat Angkut Antonov An-12B yang merupakan pesawat terbang angkut kelas menengah militer buatan perusahaan Antonov dari Uni Soviet.

Armada Darat

Hampir seluruh pasukan darat Indonesia menggunakan senjata AK-47 yang dibeli dari Rusia.

Gambaran kekuatan militer Indonesia di masa lalu tersebut tentu saja menjadi sejarah yang patut dibanggakan, bahwa setidaknya kita pernah menjadi sebuah bangsa yang memiliki kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi kemungkinan datangnya invasi militer. Melakukan pembaruan persenjataan adalah keniscayaan, tapi memandang hal itu sebagai satu-satunya jalan memperkuat pertahanan negara untuk hari ini, adalah tidak melulu bisa dianggap tepat.

Membeli alat-alat tempur yang bisa "menakut-nakuti" negara lain yang berminat menginvasi kedaulatan Indonesia secara militer, apakah selalu menjadi satu-satunya pilihan untuk mengembalikan "pamor" kita sebagai bangsa?

Untuk menjawab hal itu, kiranya kita harus merenung dan duduk sejenak untuk menilai benar atau tidaknya hal itu.

Jika dibandingkan dengan kondisi negara-negara di Timur Tengah, kawasan Asia (khususnya negara-negara yang bertetangga dan tergabung dalam ASEAN) sangatlah berbeda dan relatif tidak bergejolak seperti negara di Timur Tengah. Negara-negara Asia khususnya yang tergabung dalam ASEAN telah menunjukkan keakraban antar sesama negara dengan membuka begitu banyak kerjasama ekonomi dan politik. Hingga keadaan tersembut memperkecil kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang akan berakhir dengan saling menyerang dengan dengan menggunakan kekuatan militer. Pun muncul kemungkinan konflik, dalam kondisi tersebut, maka pendekatan diplomasi dan politik menjadi salah satu pilihan yang sangat masuk akal untuk diambil sebagai langkah awal.

Keadaan yang relatif ter-konsolidasikan tersebut memang tidak boleh membuat kita abai pada pengembangan kekuatan pertahanan kita, namun hal tersebut juga harus membuat kita tak mampu menahan diri dari melakukan langkah pengembangan pertahanan yang "membabi buta". Yang dimaksud dengan "membabi buta" dalam hal ini adalah dengan memprioritaskan pengembangan satu bidang pertahanan dan mengabaikan pengembangan bidang lain, yang pada dasarnya memiliki peran penting juga dalam membangun sistem pertahanan nasional yang kuat.

Apakah keadaan yang relatif tenang, seperti hari ini, berarti kita bisa "meminggirkan" kebutuhan pertahanan kita akan armada militer? Pertanyaan tersebut tentu juga mudah dijawab, bahwa militer akan selalu dibutuhkan oleh sebuah negara, sebab ancaman terhadap kedaulatan negara, yang bisa sudah tidak melulu datang dari negara lain, juga bisa datang dari dalam negeri sendiri dalam berbagai bentuknya.

Di masa lalu, hal itu telah ditunjukkan dengan adanya pemberontakan dan gerakan sparatis yang membuat kekacauan dengan harapan bisa membangun negara sendiri dan melepaskan diri dari NKRI. Hari ini, gerakan-gerakan yang terindikasi berbahaya dan mengancam kedaulatan, persatuan dan keutuhan NKRI juga kerap muncul melalui aksi-aksi teror. Bisa jadi gerakan terdahulu dan hari ini memiliki semangat dan tujuan berbeda, tapi pada tingkatan tertentu, keduanya telah menyebabkan teror yang kurang lebih sama dan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa.

Namun demikian, pemisahan antara TNI dan Polri telah menjadi jawaban dari kenyataan tersebut. Gerakan sparatis dan teror yang hari ini terjadi tentu saja menjadi wewenang Polri untuk mengatasinya sebagai alat keamanan negara. Militer, dalam arti TNI, hendaknya tidak terlalu jauh terlibat kecuali jika Polri benar-benar "lumpuh" dan tidak mampu menanganinya.

Dengan kenyataan tersebut, maka pengembangan persenjataan militer (TNI) kita belum perlu menjadi prioriotas dengan mengorientasikan seluruh anggaran belanja negara pada ketersediaan alat tempur paling apik. Tapi tentu penentuan prioritas jenis alat pertahanan menjadi penting, mengingat luas kawasan kita yang harus dijaga dari segala macam ancaman kedaulatan. Selain itu, motivasi pengembangan

persenjataan perang kita juga harus sudah *clear*, bukan dengan semangat invasi militer dan keinginan berperang dengan negara lain, melainkan dengan motivasi untuk *self defend* terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan dari negara lain.

b. Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pertahanan

Belum lama ini, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia meningkat pesat jika merujuk peringkat yang dirilis *Global Fire Power*. Berdasarkan rilis tersebut, kekuatan militer Indonesia naik di urutan ke-12 dunia dari urutan sebelumnya yang berada pada urutan 19.

Hal tersebut bisa jadi terdengar menarik mengingat sistem persenjataan kita yang terbilang belum jauh berkembang dibandingkan negara lain.

Namun ternyata, Ryamizard memaparkan bahwa penilaian tersebut tidak sekadar memperhatikan perkembangan dan kekuatan persenjataan sebuah negara, namun juga juga memperhatikan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dan siap membela negara jika negara sedang mengami ancaman. Bagaimanapun ada sekitar 129 juta dari 250 juta penduduk yang dapat dilibatkan saat membela negara jika negara sedang terancam.

Standar penilaian yang digunakan *Global Fire Power* bisa jadi tidak salah, sebab bagaimanapun besaran sumber daya manusia yang tersedia di sebuah negara bisa menjadi modal tersendiri dalam memperkokoh sistem pertahanan yang ada.

Jika kekuatan militer sebuah negara bersatu dengan penduduknya (dalam kondisi-kondisi yang mengancam) maka tak terbilang jumlah kekuatan yang terhimpun. Pelajaran tentang hal ini sebenarnya sudah ada dalam sejarah perjalanan bangsa kita, terutama saat pasukan Indonesia memilih menggunakan strategi perang gerilya dalam menghadapi kekuatan Sekutu yang hendak mengembalikan kuasanya atas Indonesia.

Dan sejarah kita telah membuktikan dengan nyata, ketika kekuatan militer menyatu dengan semangat rakyat, maka ketimpangan teknologi pertahanan di masa lalu tidak lagi menjadi penting.

Maka apa yang dikatakan Ryamizard selanjutnya untuk melakukan inovasi terkait SDM guna meningkatkan pertahanan nasional adalah bisa diterima akal. Ia mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, Kementerian Pertahanan menargetkan 100 juta kader bela negara melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di seluruh Indonesia. Sebuah program yang akan digelar di 47 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang berada di 11 Kodam.

Langkah yang disiapkan oleh Menhan ini terbilang cukup apik, tapi tentu ada yang harus selalu diingat, bahwa Kader Bela Negara nantinya adalah tetap merupakan orang sipil (yang menjadi penopang kebutuhan pertahanan) sehingga paradigma setiap orang sebagai warga sipil harus terus dijaga dan dipelihara. Tidak menjadikan mereka murni bermental militer dengan menerapkan doktrin yang serupa 100% dengan yang ada dalam dunia militer.

c. Riset sebagai Basis Kekuatan Pertahanan

Perkembangan zaman, teknologi dan segala bidang keilmuan tentu menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari terjadinya di setiap belahan dunia, pun demikian di Indonesia. Secara lebih khusus maka perkembangan dalam bidang pertahanan pun menjadi harus untuk mendapat perhatian secara lebih khusus, sehingga pertahanan nasional kita tidak tertinggal dengan negara lainnya.

Langkah yang bersifat antipasi kini menempati posisi yang strategis dalam pembangunan sistem pertahanan kita. Hal itu menjadi strategis demi kepentingan membaca kemungkinan munculnya ancaman dan cara-cara menghadapinya baik teknologi yang diperlukan terkait hal tersebut.

Inovasi dalam hal pertahanan kiranya menjadi sesuatu yang sudah disadari pentingnya oleh Kementerian Pertahanan sendiri, mungkin karena itu pula kemudian mereka menelorkan inovasi dalam bidang akademis berbentuk Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN). Langkah yang terbilang sangat tepat guna melahirkan intelektual dalam bidang pertahanan negara.

Selain inovasi tersebut, penguatan lembaga riset untuk mendukung pengembangan pertahanan negara menjadi sangat penting. Sebuah lembaga yang secara khusus melakukan riset untuk kepentingan pertahanan, baik dalam sektor sosial budaya maupun teknologi (persenjataan) pertahanan itu sendiri.

Mengapa sektor sosial budaya? Sektor tersebut hendaknya haruslah mendapat porsi khusus untuk ditela'ah mengingat tantangan yang ada dalam dunia pertahanan tidak dapat lagi dihadapi hanya menggunakan pendekatan-pendekatan konvensional yang melulu mengedepankan langkah militer, mobilisasi pasukan dan persenjataan. Diperlukan pilihan strategi yang lebih humanis dan mengedepankan penghormatan terhadap hak hidup setiap manusia. Sebab bagaimanapun, Indonesia adalah sebuah bangsa yang sedang bersiap menuju kondisi yang lebih maju. Dalam pada itu, paradigma yang lebih maju dalam hal pertahanan menjadi sangat diperlukan. Utamanya sebuah paradigma yang mampu mendudukkan kebutuhan pertahanan dengan kebutuhan perkembangan demokrasi yang ada.

Sementara riset teknologi pertahanan juga tidak kalah pentingnya untuk menghadapi perubahan-perubahan jenis pertarungan dan serangan yang terjadi pada level nasional dan internasional.

Contohnya internet yang telah mengantar kita pada kondisi di mana dunia seakan tanpa tapal batas. Sebagaimana kita semua mahfum, internet tak ubahnya sebuah pedang bermata dua yang bisa melindungi dan menyerang sekaligus. Melalui media tersebut dapat menyebar berbagai hal yang jika tak disikapi dengan bijak, dapat memicu berbagai hal yang dapat mengancam keutuhan masyarakat.

* *Diolah dari berbagai sumber dan bahan bacaan: Jurnal Pacis HI Unpar, Bandung, Bulan Mei 2006; http://www.kemhan.go.id; http://nasional.republika.co.id; militer-review.blogspot.co.id; http://soekarnonkri.blogspot.co.id*

Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia pasifik. Apa Geopolitik Leverage Indonesia?

Hendrajit
Peneliti Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute

"Orang tidak bisa menyusun Pertahanan Nasional yang kuat, Orang tidak bisa membangun Satu Bangsa yang kuat, Sebagai Satu Bangsa Negara yang Kuat, Kalau tidak Berdasarkan Pengetahuan Geopolitik.

(Bung Karno, Mei 1965)

Mengapa Harus Menghidupkan Kembali Geopolitik?

Jenderal vo Nguyen Giap, konseptor dan arsitek pertahanan nasional Vietnam yang sukses mengusir Perancis pada 1954 dan Amerika Serikat pada 1975, pernah mengungkap rahasia suksesnya: Kekuatan Kami, baik defense maupun offensive, kami dasarkan atas keadaan-keadaan yang nyata dari Vietnam sendiri. Bukan atas dasar pengetahuan dari luar. Melainkan atas dasar pengetahuan geopolitik dari Vietnam. (1)

Atas dasar pandangan Nguyen Giap tersebut, Bung Karno ketika berpidato pada pembukaan Lembaga Pertahanan Nasional pada 1965, menganjurkan agar kita sebagai anak bangsa mengetahui kondisi tanah air kita. Geopolitik kita. Geopolitik merupakan pengetahuan segala sesuatu yang berhubungan

dengan konstalasi geopolitik sebuah negeri. Tahun seluk-beluk bangsa dan tanah air. Mengenal segala kondisi baik fisik dan mental dari wilayah berikut masyarakatnya.

Maka dalam penyusunan pertahanan yang efektif, maka tahapannya adalah mengenali dan mengetahui segala unsur dari tanah air dan bangsanya sendiri. Baru kemudian ditentukan model dan cara menyusun pertahanannya.

Geo itu bahasa Inggris, arti Indonesianya adalah bumi, tanah, dan seterusnya. Ia adalah salah satu unsur kehidupan selain air, api dan angin serta merupakan asal-usul manusia (Adam) dulu. Dimanapun geo, seharusnya tak hanya mengantar manusia atau bangsa pada gerbang kemerdekaan tetapi lebih jauh lagi yakni membentuk bangsa dan negara yang hidup di atasnya bermartabat di dunia.

Seperti dikatakan oleh Bung Karno, "Dulu Jepang mengebom Pearl Harbour itu tujuannya adalah Tarakan untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politik, tapi soal bagaimana menjadikan manusia di dalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya" (1956). Dengan demikian, geopolitik merupakan ilmu tua yang mampu mengintegrasikan semua hakikat keilmuan, karena di atas geo itulah seluruh permasalahan manusia diselesaikan. Manakala abai terhadap geopolitik, hal itu merupakan titik awal dan sumber bencana bagi ilmu-ilmu (politik) yang ada.

Memahami dan implementasi geo-politik itu sederhana saja, menurut Panglima Besar Soedirman: "pertahankan rumah serta pekarangan kita sekalian" (1947); atau Bung Karno menyebut "ketahanan nasional dapat maksimal jika berdasarkan geopolitik" (1965); Pak Harto dulu sering menyatakan: ".. kesatuan daratan, kesatuan lautan dan kesatuan udara ini dipandang sebagai satu keseluruhan yang bulat. Itulah wawasan nusantara" (1967).

Geopolitik meniscayakan orang belajar tentang realitas dan hakikat materi serta non materi atau spirit. Oleh sebab perjalanan sebuah bangsa tak lepas dari kedua dinamika dan dialektika alam tersebut (materi dan non materi), sementara ilmu dan filsafat membentang dalam spektrum di atas permukaan. Dengan demikian geopolitik sebagai ilmu dan kenyataan hidup, umurnya sudah setua bumi bahkan seuzur kehidupan manusia itu sendiri.(2)

Geopolitik-Indonesia

Indonesia memiliki geopolitik yang strategis dalam interaksi global, selain posisinya di antara dua samudera dan dua benua yang merupakan peluang betapa besar peran yang bisa dimainkan di panggung internasional, juga memiliki kekayaan alam (SDA) beraneka lagi melimpah ruah. Tetapi bangsa ini tidak mampu "mengelola" secara tepat dan baik letak ke-"strategis"-an posisi dan kekayaan SDA yang dimiliki. Mungkin hanya di era Bung Karno, Indonesia mampu mengelola geopolitiknya.

Makanya ia berani menggempur Belanda di Irian Barat dan "mempermainkan" Amerika Serikat. Bung Karno memahami jika Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar

di Asia Pasifik, dan nisaya bakal mengancam kedaulatan Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia. Di wilayah barat memiliki lumbung minyak Sumatera, Jawa dan Kalimantan, sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia.

Sumatera adalah salah satu bukti nyata. Pulau di sebelah barat Indonesia ini tak sekadar cerita tentang pulau emas, eksotisme alam liar nan indah atau kemashyuran Sriwijaya. Secara geopolitik Sumatera ini sejatinya sangat strategis, namun celakanya banyak orang Indonesia sendiri yang tidak menyadarinya. Sumatera adalah tempat pertama sekaligus terakhir di Asia Tenggara yang ditemukan dunia perjalanan internasional (Baca Sumatera Tempo Doeloe, dari Marcopolo sampai Tan Malaka, Anthony Reid, ed).

Sebagai semacam barikade yang dihadapkan pada titik-titik masuk maritim ke Asia bagian timur, Sumatera adalah tempat pendaratan pertama di bidang pelayaran. Emas dari rangkaian pegunungannya, lalu kapur barus dari hutan-hutannya, menarik para pedagang dari seluruh dunia menuju magnet Suvarna dvipa-Tanah Emas. Bukan itu saja. Beberapa jejak peninggalan tertua dari pengaruh India, Arab, dan Cina di Asia Tenggara dapat ditemukan di Sumatera. Luar biasa!

Deli, di Sumatera Timur, sekadar ilustrasi yang lain lagi. Jika kita menelisik ke 1919, Tan Malaka dalam autobiografinya Dari Penjara ke Penjara, sudah melukiskan Deli sebagai tanah emas, surga buat kaum kapitalis. Di perbatasan Deli dengan Aceh, terdapat minyak tanah yang berpusat di Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, dan Perlak.

Bahkan, di perbatasan Deli dengan Aceh terdapat besi. Seperti di Singkep, Bangka dan Belitung, di Jambi sendiri terdapat timah. Bauksit di Riau dan Alumunium terdapat di Asahan, Deli. Bahkan jika dihubungkan dengan arang di Sawahlunto dan airmancur Sungai Asahan, yang punya kodrat nomor 2 atau nomor 3 di dunia, maka bumi dan air Deli sekitarnya dapat mengadakan perindustrian berat apapun juga. Apalagi kalau nanti dapat diperhubungkan lagi dengan logam besi, timah, dan lain lain dari tanah.

Kalau kita mempelajari dan menyerap apa yang menjadi ketahanan budaya dan ketahanan nasional negara-negara lain, Iran bisa kita jadikan contoh nyata yang paling aktual. Betapa kesadaran dan wawasan geopolitik dan geostrategi para elit pemerintahan di Iran, merupakan salah satu faktor kebangkitan Iran sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan Cina.

Dengan segala kelebihan serta keterbatasannya mampu memaksimalkan peran geopolitik dalam perpolitikan global. Setidak-tidaknya ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Ahmadinejad dalam *psy war* kemarin telah membuat "kekhawatiran" para adidaya dunia, terutama bagi jajaran negara yang sangat tergantung dari dinamika selat tersebut. Ini cuma sekilas contoh, betapa dahsyat pemanfaatan geopolitik suatu bangsa bila dikelola secara baik, bahkan dapat dijadikan

geopolitic weapon.

Namun untuk itu, para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional, harus menyadari betapa pentingya wilayah NKRI secara geopolitik. Menyadari bahwa Indonesia yang letak geografisnya berada di antara benua Asia dan Autralia, serta diantara Lautan Hindia dan Lautan Pasifik, menyebabkan Indonesia punya posisi yang unik dan jarang dipunyai negara-negara lain.(3)

Selain dari itu, data menggambarkan bahwa Indonesia memilikii 39 selat dimana 4 selatnya termasuk checkpoint shipping dari 9 selat-selat tersibuk di dunia semacam Selat Hormuz, atau Selat Malaka, dan lain-lain. Bahkan saat ini, hampir 50 persen perdagangan laut komersial dunia dilakukan melalui perairan Indonesia dan perairan regional kawasan ini. Bisa dipastikan bahwa negara-negara lain sebagai pengguna jalur strategis ini, memandang Indonesia secara geopolitik memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi perdagangan internasional.

Berarti, Indonesia punya satu senjata ampuh, yaitu takdir geopolitik yang akan tumbuh sebagai pusat perebutan pengaruh geopolitik negara-negara adidaya dan menjadi pusat gravitasi perekonomian global. Luas wilayah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara, penduduk terbanyak dan sumberdaya alam (SDA) terkaya di Asia Tenggara, telah menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama dan kunci stabilisator keamanan kawasan.

Sayangnya, sebagaimana diurai di atas, ilmu dan wawasan geopolitik di republik tercinta ini terdangkalkan bahkan terabaikan, sehingga bangsa ini tak mampu mensyukuri, menikmati dan mengelola karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru termarginal dalam kelimpahan rahmat-Nya.(4)

Tatkala abai terhadap geopolitik, para elit pun seperti kehabisan waktu dan energi berdebat kesana-kemari dalam derivatif berbagai paradigma serta teori sosial politik yang sebenarnya telah dihegemoni oleh kepentingan asing. Terjebak gegap diskusi pada tataran permukaan malah melupakan hal-hal yang tersirat, apalagi membahas yang di bawah permukaan. Nonsense. Bahwa debatisasi berbagai elemen bangsa kini diduga kuat telah dirajut oleh asing dan kaum komprador menjadi "industri demokrasi" dengan berbagai manufaktur dan fabrikasi, seperti perbedaan pendapat, demonstrasi, ego sektoral, konflik, parlemen jalanan dan lainnya.

Maka inilah kemenangan wilayah simbol-simbol (kulit) namun tersungkur di ruang hakiki (substansi). Lembaga pendidikan dan pusat kajian dipompa hanya sekedar mengejar gelar serta status sosial dengan paradigma dan teori yang telah dikendalikan, berputar-putar dalam isue serta terminologi "rekayasa" (demokrasi, HAM, lingkungan dll) yang berpihak kepada kepentingan luar tetapi nihil terhadap historisme yang mutlak harus dipikul dan menjadi tanggung jawab sejarah, sosial dan realitas politik terutama bagi kepentingan nasional saat ini.

Dangkalnya Kesadaran dan Wawasan Geopolitik, Mudah Masuk Perangkap Skema Kepentingan Strategis Asing.

Sebagai contoh sederhana ialah

maraknya berbagai konflik di tanah air sesungguhnya tak boleh dilepas dari hipotesa sebagai "hajatan asing" dalam rangka protection oil flow atau blockade somebody else oil flow. Pola yang lazim digunakan oleh kolonialisme ialah menghadirkan pasukan multinasional melalui resolusi PBB dengan alasan HAM dan kemanusiaan, lalu dikeroyok ala NATO seperti Libya atau berujung referendum sebagaimana terjadi di Sudan, Timor Timur dan lainnya. Itulah potensi yang bakal terjadi di republik ini, sementara para elit bangsa "sibuk" dengan dinamika di permukaan namun melupakan what lies beneath the surface (apa yang terkandung di bawah permukaan).

Sekali lagi, abai geopolitik berarti awal bercokolnya "permainan asing" dan menjadi penyebab kehancuran sebuah bangsa.

Dengan kegelisahan pokok seperti terpapar di atas, maka mengenali dan mengetahui konstalasi geopolitik Negara-negara adidaya, merupakan langkah pertama kita untuk mengenali dan mengetahui kondisi-kondisi fisik dan mental bangsa kita, geopolitik kita sendiri.

Merevisi Kembali Doktrin Sir Harold McKinder

Agaknya asumsi itu semakin menebalkan tesis Sir Halford Mackinder, pakar geopolitik Inggris abad ke-19 yang mengklasifikasikan dunia kedalam Empat Kawasan. Empat kawasan tersebut terdiri dari Heartland (meliputi Asia Tengah dan Timur Tengah), Marginal Lands (meliputi Eropa Barat, Asia Selatan, sebagian Asia Tenggara dan sebagian daratan China), Desert (Afrika Utara), dan Island or Outer Continents (meliputi benua Amerika, Afrika Selatan, Asia Tenggara dan Australia).

Tesis Mackinder menyebutkan, bahwa negara yang menguasai kawasan Heartland (memiliki kandungan sumberdaya alam dan mineral yang melimpah), niscaya akan menuju kepada "Global Imperium". Dalam kajian politik, conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow merupakan modus kolonial sejak dulu, dan sering dilakukan untuk menebar penyesatan (mengalihkan perhatian), baik dalam bentuk konflik ataupun gerakan-gerakan massa lainnya di permukaan, agar yang menjadi tujuan utamanya tidak terpantau.(5)

Menurut cermatan GFI, 'Empat Kawasan' Mackinder itu, tampaknya sudah tidak akurat lagi. Ini terbaca dari Smart Power-nya AS, apalagi melalui Arab Spring, AS ternyata juga menggoyang negara-negara Afrika Utara seperti Libya, Tunisia, dan Yaman yang nota bene merupakan kawasan Desert. GFI mengendus, AS dan sekutunya kini justru tengah menerapkan teori Toni Cartalucci, Research Assosciate di Central for Research on Globalization (CRG), Montreal, Kanada.

Cartalucci berasumsi: "Matikan Timur Tengah, maka anda mematikan China dan Rusia, dan anda akan menguasai dunia". Faktanya bahwa sejak 1979, cengkeraman AS terhadap beberapa negara di Timur Tengah melalui Dewan Kerjasama Teluk (GCC) memang terbukti unggul dalam hal dominasi minyak dunia. Setidaknya 90% transaksi ekspor minyak dari kelompok GCC atau 40% minyak dunia, dikuasai oleh AS.

Pertanyaannya adalah kenapa Rusia dan China tidak juga "mati" bahkan semakin menggeliat. Agaknya Cartalucci lupa, bahwa saat ini Rusia sudah menjadi Autarky (negara swasembada) seperti halnya Kanada. Artinya bahwa ketergantungannya terhadap negara lain sangat kecil. Sebaliknya, meskipun kemajuan ekonomi dan militernya relatif signifikan namun China masih tergantung dengan impor.

Menurut hipotesa GFI, hal ini semata-mata karena ENERGI masih tetap sebagai kunci skema bagi setiap manuver apapun, terutama militer. Begitupun, sampai saat ini Kawasan Heartland masih dianggap sebagai titik tolak geopolitik global, sebab merupakan basis produsen minyak dan gas alam dunia, meskipun dalam perkembangannya banyak jajaran negara Afrika Utara, Amerika Latin dan Rusia telah menjadi Net Oil Exporter.

Perkembangan aktual perpolitikan internasional saat ini memang mengisyaratkan terjadinya pergeseran sentral geopolitik dari Kawasan Timur Tengah menuju ke Asia Tenggara, khususnya Laut China Selatan.

Isyarat peralihan tersebut terlihat dari beberapa indikasi, diantaranya AS ingin secepatnya membangun sistem pertahanan rudal di Asia guna melawan manuver Korea Utara. AS juga menyatakan akan memperluas pengaturan militernya di Asia Tenggara dan Samudera Hindia, termasuk peningkatan kerja sama dengan Australia dan penempatan kapal-kapal perang di Singapura.

Selain itu, AS juga mendukung pembentukan ASEAN Security Community pada 2015, dan terkait dengan isu Laut China Selatan, melalui Menhan Leon Panetta, AS menganjurkan agar ASEAN melakukan "tindakan seragam" sekaligus menyusun kerangka aksi yang memiliki kekuatan hukum. Tapi yang paling mengejutkan adalah rencana AS untuk menggeser 60% armada tempurnya ke Asia Pasifik.

Kompleksitas pertikaian wilayah di Laut China Selatan, disinyalir memang bukan sebatas klaim kepemilikan pulau-pulau, melainkan ada persoalan lainnya, diantaranya hak berdaulat atas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), termasuk penggunaan teknologi baru terkait exploitasi dan explorasi minyak dan gas bumi oleh negara tertentu.

Ketegangan antara negara-negara di kawasan tersebut secara politis cenderung meningkat karena miskinnya win-win solution. Urgensi geografis Laut China Selatan yang cukup vital dalam pergeseran geopolitik global, memungkinkan terus terkendalanya upaya penyelesaian sengketa, bahkan diduga keras bahwa isu konflik teritorial itu akan menjadi trigger dalam benturan militer secara terbuka.

Situasi ini tentunya akan mempengaruhi negara-negara di sekitar wilayah sengketa, dimana secara geografis, posisi Indonesia berada cukup dekat dengan Laut China Selatan, baik dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN maupun Asia Pasifik.

Situasi ini diperkirakan akan berlangsung lama, karena selain menunggu 'momentum', negara-negara yang terlibat konflik juga melakukan upaya antisipasif secara intensif dan terbuka, terutama AS dan sekutunya versus China dan pendukungnya.

Jalur Sutra Baru: Dasar Skema Kolonialisasi Impereliasme Barat

Sebelum beranjak terlalu jauh, mari kita selintas bahas soal Geopolitik. Kalau menyinggung geopolitik, maka kita ingat pakar geopolitik Inggris Halford Mackinder (1861 – 1947) yang menelorkan Teori Heartland (Jantung Dunia).

Asumsinya: "Barangsiapa menguasai Heartland maka akan menguasai World Island". Dijelaskan oleh Mackinder, bahwa Heartland itu istilah lain Asia Tengah, sedangkan World Island adalah Timur Tengah. Tidak dapat disangkal siapapun, kedua kawasan adalah wilayah yang kaya akan minyak, gas bumi dan bahan mineral lain di muka bumi. Siapa menguasai kawasan tersebut akan menjadi Global Imperium, kata Mackinder!

Itulah sepintas asumsi melegenda puluhan tahun lampau yang masih diterapkan hingga kini oleh para adidaya khususnya Paman Sam dan sekutu. Yang kerap kita abaikan adalah fakta bahwa "Teori Heartland" (penguasaan Asia Tengah dan Timur Tengah)-nya Mackinder sesungguhnya hanya bagian (penggalan) dari **Jalur Sutera**,. Karena dalam teorinya Mackinder tidak menyertakan kawasan Afrika Utara sebagai salah satu faktor penting dalam konstalasi politik internasional.

Sehingga kita sering abai ketika negara-negara adidaya melakukan mapping kolonialisasi di dunia, baik yang dilakukan oleh think tank berikut para manpower negeri kaum penjajah dimanapun, niscaya akan merekomendasi, bahwa menguasai kedua negara (Mesir dan Syria) hukumnya wajib bahkan mutlak. Tak bisa tidak. Itulah strategi awal penguasaan geopolitik di Jalur Sutera apabila ingin 'merajai dunia'.

Ya, strategi penguasaan wilayah Jalur Sutra yang menjadi dasar skema kolonialisasi negara-negara imperialis barat dari dulu hingga kini, seringkali tidak diketahui atau dengan sengaja diabaikan.

Jalur Sutera itu sendiri ialah lintasan rute yang membentang antara perbatasan Rusia/Cina, Asia Tengah-Timur Tengah, Afrika Utara hingga berujung di Maroko.

Jalur Sutra membelah antara Dunia Barat dan Timur. Itulah kawasan sentral pergerakan (ekonomi) barang dan jasa bahkan dikumandangkan sebagai legenda jalur militer dunia sejak dahulu kala.

Mengendalikan Jalur Sutera, identik menguasai dunia, dan menguasai Mesir dan Syria, ibarat sudah menguasai separuh jalurnya.

Namun David Rockefeller, nampaknya sudah membaca tren global akan berubah dan bergeser ke Asia Pasifik, karena skema distribusi energi(minyak) akan bergeser ke Laut Cina Selatan. Karena dari berbagai penelitian, 80 persen impor Cina melalui perairan Laut Cina Selatan. Di sinilah relevansi kajian *Deep Stoat* di awal tulisan saya tadi.

Maka, David Rockefeller kemudian mengembangkan konsep Jalur Sutra menjadi *New Silk Road* yang terdiri dari Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Laut Andaman, Teluk Bengal, hingga ke Lautan Hindia.

Maka ketika Alfred Mahan, pakar kelautan Amerika Serikat (AS) yang hingga kini "doktrin"-nya masih

dianut bahkan diletakkan sebagai dogma negara terutama angkatan laut: **"Barangsiapa merajai Lautan India maka ia bakal menjadi kunci percaturan di dunia internasional". Berarti tersirat yang dimaksud Alfred Mahan adalah Lautan Hindia.**

Bisa dimengerti jika Paman Sam tidak puas hanya dengan *US Africa Command* (US AFRICOM) guna mengendalikan Afrika, atau *US Central Command* (US CENTCOM) untuk mencengkeram Dunia Arab. AS pun membangun pangkalan militer terbesar dunia di Diego Garcia, Kepulauan Chargos, Lautan India. Setelah itu, masih dibangun pula pangkalan militer di Pulau Socotra, Yaman. Belum lagi pangkalan militer lainnya seperti di Pulau Cocos, Darwin, Subic dan lain-lain.

Sekadar informasi. selain Socotra itu merupakan PINTU GERBANG ke Jalur Sutera melalui Teluk Aden, Laut Merah - Terusan Suez dan bermuara di Laut Mediterania, juga letak pulau tersebut ternyata hanya 3000-an Km dari Diego Garcia, artinya jika kelak terjadi situasi darurat militer, maka permintaan penguatan militer ke Socotra bisa berlangsung secara cepat.

Temuan tim riset Global Future Institute bahwa komando dan kendali tertinggi gerakan AS berpusat di Pulau Socotra, sedang manuver untuk wilayah Afrika dan Arab terletak di Qatar.

Maka bukan hal yang aneh jika media mainsteam Al Jazeera yang sering menjadi propaganda Barat justru ada di Qatar.

Masih ingat George Rich mentornya John Perkins? Simak nasehatnya: "Pergilah kau ke Mesir, dan gunakan negeri itu sebagai daerah transit untuk menaklukkan Timur Tengah dan juga daerah transit untuk Afrika".

Cerita Seputar Pencaplokan Pulau Socotra

Menurut dokumen GFI, tanggal 2 Januari 2010 lalu, Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh mengadakan rapat tertutup dengan Panglima Komando Militer AS Jenderal David Petraeus. Diberitakan oleh media massa pertemuan itu adalah koordinasi penanganan aksi Al-Qaeda yang berbasis di Yaman, namun akhirnya terungkap bahwa pertemuan tersebut membahas soal Socotra.

Singkat cerita, Presiden Saleh pun menyerah atas "desakan" Petraeus. Pulau Socotra diserahkan kepada AS sebagai pemegang otoritas keamanan dalam rangka *War on Terror* (WoT) dan menumpas aksi-aksi perompakan warga Somalia. Dalam skema WoT kelak, Socotra diproyeksikan menjadi pangkalan militer, oleh karena otoritas AS diperkenankan untuk menggelar berbagai pesawat termasuk pesawat tempur dan komersil.

Kemudahan mencaplok pulau unik tersebut, selain disebabkan pemberian konsesi ekonomi kepada petinggi Yaman sejumlah $ 14 juta US dari *Kuwait Fund for Arab Economic Development* guna membangun pelabuhan, juga ada isyarat Petraeus akan memberi bantuan peralatan militer. Akan tetapi, fakta menyebut bahwa pasca penyerahan Socotra kepada AS, sesaat kemudian meletus gejolak massa dalam rangka pelengserkan Ali Abdullah dari kekuasaannya ---belakangan aksi massa tadi disebut Arab Spring atau Musim Semi Arab.

Pertanyaan investigative kemudian muncul: adakah korelasi antara gerakan massa di Yaman yang notabene merupakan benih Arab Spring dengan keberadaan Socotra sebagai kendali tertinggi AS untuk "manuver"-nya di wilayah Afrika dan Arab? Pertanyaan lagi: siapa berani menyanggah, bahwa maksud tersembunyi pada kalimat "Lautan India" dalam uraian Doktrin Mahan makna tersiratnya ialah Jalur Sutera?

Mengapa Bergeser ke Asia Pasifik?

Jawabannya sederhana. Amerika dan Cina sama-sama mengincar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Malaka memang selat paling sibuk setelah Hormuz. Dan peningkatan pelayaran merupakan keniscayaan seiring gegap dinamika baik kebutuhan maupun kepentingan pribadi, kelompok dan juga bangsa-bangsa di dunia.

Mari kita simak Zhao Yuncheng, ilmuwan dari *China's Institute of Contemporary International Relation:* "*Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China's oil supply route*."

Masuk akal jika Presiden Cina Hu Jiantao menegaskan, "*Malacca-Dilemma*" merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi mengingat 80% impor minyak Cina melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di "selat basah" ini menjadi *urgen* bagi kelanjutan ekonomi Negeri Paman Mao.**(6)**

Maka Cina pun menerapkan konsep *String of Pearls*. Yaitu strategi Cina dalam rangka mengamankan suplai energi. Strategi ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern yang progresif, juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. **Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut Cina Selatan, Selat Malaka, melintasi Samudera Hindia, Laut Arab dan Teluk Persia. Sehingga dalam peta, terlihat mirip untaian mutiara atau gambar kalung (*Pearls*).**

Inilah yang kita prediksikan akan semakin menajamnya konflik terbuka AS versus Cina di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Karena Amerika pun sudah merekomendasikan hal ini lewat Council of Foreign Relations(CFR) pada 2002, dan bahkan sudah digodok secara lebih matang lewat beberapa think thank di Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Preisden George W Bush yang kemudian kita kenal sebagai Project New American Century(PNAC).

Pihak perancang kebijakan stretegis Keamanan Nasional di Washington tentunya mencermati dengan seksama strategi String of Pearls tersebut.

Betapa tidak. Implementasi *String of Pearls* ini memang tergantung fasilitas militer yang memadai di Pulau Hainan; landasan terbang darurat di Pulau Woody, Kepulauan Paracel, jaraknya sekitar 300 mil dari laut timur Vietnam; kontainer fasilitas pengiriman di Chittagong, Bangladesh; pembangunan pelabuhan air dalam di Sittwe, Myanmar; pembangunan basis angkatan laut di Gwadar, Pakistan; pipa melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke Kashgar di Xinjiang; fasilitas pengumpulan intelijen di pulau-pulau di Teluk Benggala dekat Selat Malaka dan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lainnya.

Dalam beberapa kasus, ia memberi subsidi pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas lapangan udara di negara-negara target dengan kompensasi fasilitas dibuat sesuai standar Cina.

Sehubungan dengan tarik-menarik pengaruh antara AS dan Cina ini, menarik mencermati pengamatan dan prediksi Jean Paul Rodrigue. Menurut Rodrigue, jalur transportasi minyak dan gas untuk kebutuhan energi di Asia Timur selain melalui Selat Malaka, juga melintas di Selat Sunda, Selat Lombok dan lainnya. Tak boleh dipungkiri, ketiganya merupakan selat vital bagi negara-negara Asia Timur, khususnya Cina dan Jepang. Isyarat Rodrigue, jika terjadi hambatan pelayaran di Selat Malaka maka alternatif jalur paling singkat adalah Selat Sunda.

Inilah sisi paling krusial dari wilayah seputar Laut Cina Selatan dan Selat Malaka dalam beberapa tahun ke depan. Cina sudah mengisyaratkan bahwa hambatan utama implementasi Strategi String of Pearls adalah bercokolnya kapal-kapal perang AS dan sekutu di Singapura.

Semakin menegangnya hubungan politik antara Paman Sam dan Paman Mao, niscaya memiliki implikasi negatif atas hilir-mudik pelayaran Cina di Selat Malaka. *Shock and Awe* pun telah ditebar, melalui janji mengirim kapal tempur pesisir (LCS) USS Freedom di Selat Singapura, ujar Laksamana Thomas Rowden (10/5/2012). USS Freedom ialah kapal perang jenis terbaru AS, memiliki kecepatan hingga lebih 40 knot serta handal untuk perang di lautan dekat pesisir, mampu menyapu ranjau laut dan menyerang kapal selam.

Meskipun data-data ini masih sangat terbatas, setidaknya sudah bisa dijadikan mapping sementara tentang kondisi geopolitik Asia Pasifik menjelang friksi terbuka sebagaimana ramalan PNAC 2002, baik terkait implementasi *String of Pearl* atau dinamika kapal-kapal negara pesaing Cina, yaitu Amerika dan Australia.

Selat Sunda, *Geopolitics Leverage* Indonesia?

Apabila *dilemma malacca* mencapai titik kulminasi akibat perang terbuka, maka besar kemunginan jalur Selat Malaka akan "tersumbat". Sudah barang tentu, sesuai prakiraan Rodrigue jalur pelayaran akan beralih ke Selat Sunda karena dianggap rute alternatif tersingkat dari jalur-jalur lazimnya. Inilah keunggulan Indonesia secara geopolitik terutama bagi negara-negara yang terlibat konflik. Betapa dahsyat urgensi Selat Sunda dan alur-alur laut lain di mata dunia, karena banyak negara tergantung pada wilayah perairannya.

Sejatinya tinggal bagaimana faktor geografis dijadikan *geopolitical leverage* (daya ungkit) melalui pemberdayaan secara benar dan optimal berkenaan posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera. Menurut Dirgo D. Purbo (2012), geopolitik dalam wawasan nusantara merupakan jawaban untuk Kepentingan Nasional RI di abad XXI. Tak bisa tidak, Kepentingan Nasional RI harus menjadi rujukan utama dalam memberdayakan daya ungkit (geopolitik) yang melekat sebagai keunggulan geografis Indonesia.

Masalahnya adalah, Ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia

memberi peluang Cina terlibat dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), tawaran itu mungkin dianggap "berkah" dari langit bagi Cina.

Kenapa demikian? Selain nilai proyeknya menakjubkan (sekitar Rp 100-an triliun) juga secara geopolitik, kelak Cina-lah yang "menguasai" Selat Sunda dengan alasan profit bisnis selaku investor. Belum masalah *String of Pearl* dan implementasinya. Artinya peluang itu bukan hanya mengurangi malacca dilemma atau menghindari sekalipun, tetapi bahayanya justru Cina akan menjadi pengendali baru di selat ini. Sehingga bisa memastikan tidak akan ada kendala signifikan pada sistem pelayarannya meskipun ada "sumbatan" di Selat Malaka akibat friksi melawan AS dan sekutu.

Untunglah, proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda akhirnya batal. Karena itu, jika ini terjadi bisa berpotensi timbul "bencana geopolitik." Ketika di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan terjadi pergolakan bersenjata sehingga menjadi jalur yang tidak aman, maka Selat Sunda justru akan menjadi jalur alternatif yang terdekat. Artinya, Selat Sunda merupakan senjata geopolitik Indonesia. Dan ketika Cina sudah menguasai Selat Sunda sebagai investor, maka Cina dalam posisi yang bisa mengatur sistem pengamanan maritim Selat Sunda.

Maka itu, para penentu kebijakan luar negeri jangan hanya melihat dari aspek sosial ekonomi saja, melainkan harus juga juga secara komprehensif melakukan prakiraan keadaan dan tren global ke depan. Termasuk bencana geopolitik ketika JSS pada perkembanganya bisa mengikis identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Tanpa perencanaan strategis dan pola negosiasi yang canggih dari para diplomat garis depan kita, jangan-jangan rakyat di sekitar JSS cuma menjadi penonton belaka.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertama: Memanasnya suhu politik antara Cina melawan AS dan sekutu, selain menggeser geopolitik global dari Heartland ke Asia, juga meniscayakan perubahan konstelasi di Asia Pasifik terutama Laut Cina Selatan dan perairan sekitarnya. Apalagi jika kelak benar-banar meletus konflik terbuka di perairan;

Kedua. Maka para perumus kebijakan strategis bidang luar negeri maupun ekonomi, harus mempertimbangkan nilai strategis wilayah Indonesia secara geopolitik. Dan memandang Geopolitik sebagai Ilmunya Ketahanan Nasional.

Ketiga: Menyadari pentingnya Indoensia dalam perspektif geopolitik, maka Indonesia harus mengantisipasi jika kelak terjadi perang terbuka antara AS versus Cina, potensi terjadinya perang proxy (perang perpanjangan) antara kedua negara adidaya tersebut, yang tentunya akan berdampak bagi Indonesia pada khususnya mapun ASEAN pada umumnya.

Keempat: Dari *mapping* prakiraan situasi tadi, semakin terlihat urgensi Selat Sunda dari sisi geopolitik. Artinya ketika Selat Malaka telah menjadi "jalur tidak aman" bagi pelayaran internasional akibat perang, maka rute alternatif tersingkat baik dari dan ke Lautan Hindia serta Lautan Pasifik dipastikan akan melintas di Selat Sunda

dan selat lainnya dalam koridor ALKI di Indonesia;

Kelima: Perlu dibidani produk-produk hukum terkait geopolitical leverage (pemanfaatan geopolitik), misalnya "penutupan sementara" selat-selat di Indonesia ketika dinamika pelayaran telah mengancam keamanan nasional dan Kepentingan Nasional RI. Hal ini mutlak segera dilangkahkan oleh segenap elit dan pengambil kebijakan di republik ini sebagai respon terhadap situasi yang berkembang sekaligus penyikapan peralihan geopolitik global;

Keenam: Belajar dari pengalaman pahit JSS, geopolitik harus menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan ekonomi dan luar negri yang terintegrasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kedaulatan negara, kesejahteraan maupun kepentingan pendukung lainnya. Sehingga kebijakan nasional yang diambil melibatkan berbagai instansi terkait maupun para tokoh dan masyarakat (Stake Holder).

Ketujuh: Salah satu prioritas pembangunan RI kedepan mutlak harus menguatkan sistem pengawasan dan pengamanan selat-selat Indonesia (ALKI) yang ditopang oleh lembaga dan kementerian terkait dengan maupun TNI-Polri sebagai ujung tombak;

Kedelapan: Kelak dengan sistem pengamanan dan pengawasan perairan yang canggih lagi handal, niscaya akan meningkatkan "daya tawar" Pemerintah Indonesia di forum global manapun, dan lebih jauh lagi adalah mengubah skema *geopolitical leverage* menjadi *geopolitical weapon*, atau senjata geopolitik bagi republik tercinta ini.

Catatan Akhir

1). Arahan dan Kuliah Pertama Presiden Ir Sukarno Pada Peresmian Lemhanas 20 Mei 1965.

2). Untuk studi-studi teoritis yang lebih mendalam tentang Geopolitik, baca artikel Dr Kusnanto Anggoro berjudul Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga Dan Strategi Pertahanan Indonesia, dalam Jurnal terbitan CSIS yang bertema: Perspektif Baru Keamanan Nasional(Jakarta: CSIS, 2005).

3). Kajian yang lebih mendalam terkait Indonesia dalam perspektif Geopolitik, baca artikel Hendrajit dan M Arief Pranoto, "Kenali Takdir Geopolitik Indonesia dan Aneka Corak Perang Asimetris, Majalah Aktual Edisi 37(25 Juni-9 Juli 2015).

4). Khusus untuk tema ini, silahkan baca artikel M Arief Pranoto, Geopolitik Ilmunya Ketahanan Nasional, The Global Review Quarterly, November 2014.

5). Kajian-kajian mendalam terkait pergeseran konflik global dari "Daerah Jantung" atau heartland (Timur Tengah dan Asia Tengah) ke Asia Pasifik, bisa dibaca beberapa artikel M Arief Pranoto dan Hendrajit dalam jurnal terbitan Global Future Institute, khususnya The Global Review Quarterly Edisi 2, Januari 2013. Bertema: Merobek Jalur Sutra.

6). Untuk tema ini, penulis olah dari beberapa kajian para peneliti Global Future Institute yang terdokumentasi di situs kami www.theglobal-review.com